

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

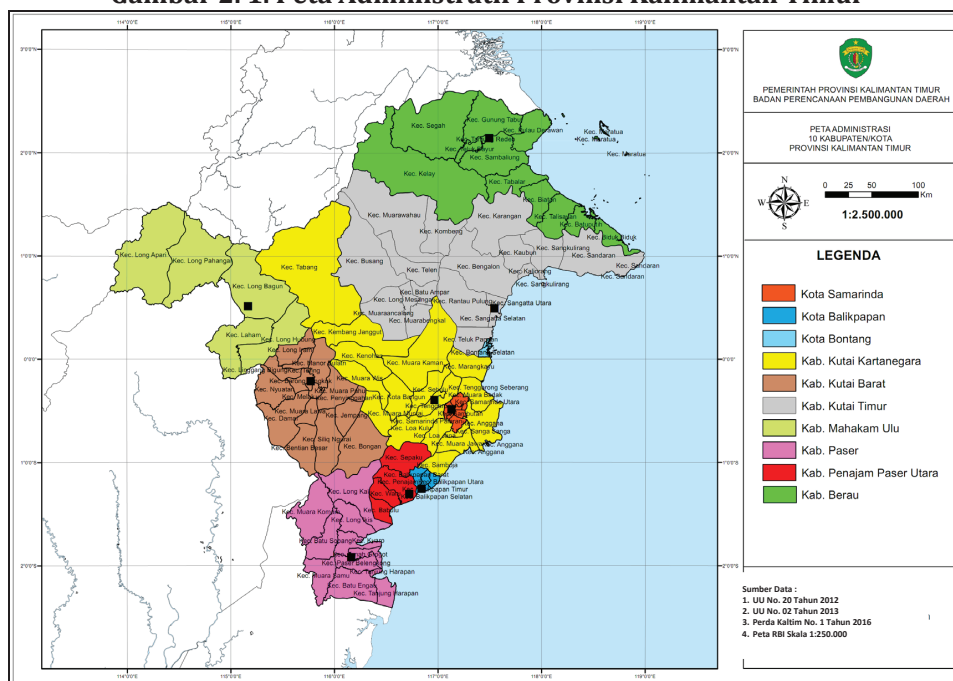
Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

##### 2.1.1 Aspek Geografi

###### a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Kalimantan Timur saat ini secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu : Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

**Gambar 2. 1. Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur**



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, 2016

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113°35'31"-119°12'48" Bujur Timur dan 2°34'23" Lintang Utara – 2°44'17"

Lintang Selatan. Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Secara garis besar sumber daya lahan Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Pembagian potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Berdasarkan dokumen tersebut, luas potensi sumber daya lahan yang tersedia adalah sebesar 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha.

Peruntukan ruang kawasan di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar masih didominasi oleh kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen (Kawasan Hutan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014), sedangkan 34,15 persen sisanya adalah kawasan non hutan yang terbagi menjadi kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan holtikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pembagian pola ruang pada RTRWP Kaltim 2016-2036 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Pola Ruang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036**

No.	Peruntukkan Kawasan	Luas (Ha)
<b>I.</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	<b><u>2.283.360</u></b>
1.1	Hutan Lindung	1.844.970
1.2	KSA/KPA	438.390
<b>II.</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA HUTAN</b>	<b><u>6.055.793</u></b>
2.1	Hutan Produksi Tetap	3.027.099
2.2	Hutan Produksi Konversi	120.438
2.3	Hutan Produksi Terbatas	2.908.255

No.	Peruntukkan Kawasan	Luas (Ha)
<b>III.</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA NON HUTAN</b>	<b><u>4.419.825</u></b>
3.1	Kawasan Industri	57.176
3.2	Kawasan Pariwisata (Darat)	97.422
3.3	Kawasan Perikanan	187.304
3.4	Kawasan Perkebunan	3.269.561
3.5	Kawasan Permukiman	396.266
3.6	Kawasan Pertanian Pangan dan Holtikultura	412.096
<b>IV.</b>	<b>PENGELOLAAN LAUT 0-12 MIL</b>	<b><u>3.997.372</u></b>
4.1	Kawasan Pariwisata (laut)	141.300
4.2	Kawasan Padang Lamun (Konservasi Laut)	44.931
4.3	Kawasan Laut sampai dengan 12 mil	3.811.141

*Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036*

Adapun kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 (diolah berdasarkan data citra satelit) didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luasan 3,89 Juta Ha, yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara (bagian barat), Kutai Barat (bagian barat dan selatan), Kabupaten Mahulu, dan Kabupaten Paser. Penutup lahan lainnya yang mendominasi di Kalimantan Timur adalah Semak Belukar dengan luasan 2,71 Juta Ha serta Hutan Lahan Kering Primer dengan luasan 2,17 Juta Ha.

Berdasarkan hasil interpretasi, kelas tutupan lahan untuk kegiatan pertambangan yang menjadi sektor dominan dalam pembentukan struktur PDRB (46,31%) di Provinsi Kalimantan Timur, teridentifikasi seluas 130.789 Ha, yang dominan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur.

Sementara untuk tutupan lahan perkebunan teridentifikasi seluas 1,33 Juta Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk kelas tutupan lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang meliputi sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran tercatat hanya seluas 494.293 Ha

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, maka sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor perizinan yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Jika dilihat berdasarkan hasil analisis geospasial, dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang (daratan)

terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas  $\pm 5,6$  Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas  $\pm 4,8$  Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas  $\pm 2,4$  Juta Ha.

Adapun alokasi pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan, baik di sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan sektor pertambangan batubara, seluruhnya berada di Kabupaten Kutai Timur. Secara umum pemanfaatan ruang untuk perizinan di Kalimantan Timur yang terbesar berada di Kabupaten Kutai Timur yakni seluas  $\pm 1,43$  Juta Ha untuk izin kehutanan, seluas  $\pm 752$  Ribu Ha untuk izin perkebunan, dan seluas  $\pm 1,41$  Juta Ha untuk izin pertambangan batubara. Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun jenis tipologi tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan lahan di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sebagai contoh misalnya di sektor perkebunan, berdasarkan hasil analisis geospasial yang diperoleh dari overlay tutupan lahan perkebunan dengan deliniasi wilayah izin perkebunan, dapat diketahui bahwasanya dari seluas  $\pm 2,76$  Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar  $\pm 1,1$  Juta Ha yang telah terdapat tanam tumbuh, atau berarti masih ada  $\pm 60\%$  luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan ruang juga harus ditekankan pada potensi ketersediaan ruang yang telah dialokasikan di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Misalnya mengambil contoh dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Berdasarkan hasil analisis geospasial dari overlay tutupan lahan dengan pola ruang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dapat diketahui bahwa dari seluas 412.016 Ha yang dialokasikan ruangnya dalam rencana tata ruang wilayah, baru sekitar  $\pm 42$  ribu Ha atau sekitar 10,3% yang saat ini telah benar-benar digunakan untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan insentif program/kegiatan agar potensi ruang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

## **b. Potensi Pengembangan Wilayah**

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan meliputi kebijakan pengembangan wilayah provinsi dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan aspek keruangan (spasial) melalui pengembangan kawasan strategis berdasarkan klaster.

Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, meliputi :

- **Kawasan Industri Manufaktur Kariangau- Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha dan berdasarkan materi teknis penyusunan Raperda RTR Kawasan Industri Manufaktur Kariangau - Buluminung perencanaan seluas 14.187,04 Ha. Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier.

- **Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda**

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

- **Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang-Marangkayu Kutai Kartanegara**

Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *Industrial Estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

- **Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur**

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (*Crude Palm Oil*) yang dioperasikan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah mendapatkan penetapan menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2015 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batuta Maloy Trans Kalimantan (MBTK). Pada tahun 2030, KIPI Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleo chemical* berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara**

Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat**

Sebelum terjadi pemekaran, Kabupaten Kutai Barat merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Negara dimana kedua wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi dan menjanjikan untuk diolah. Oleh karena itu, industrialisasi hasil produksi pertanian menjadi salah satu opsi

penting dalam perumusan kebijakan peningkatan perekonomian wilayah selain sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarui.

- **Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu**

Klaster industri kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

- **Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur**

Pengembangan klaster industri di Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten Kutai Timur (utamanya) sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang akan menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pemerintah Pusat sebagai pemrakarsa dan pelaksana tentu memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Hal ini juga harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat sehingga dalam pengalihan lahan tidak ada rekomendasi untuk lahan gambut dan tidak ada negosiasi untuk hutan primer.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi :

- **Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Museum Mulawarman terletak di Kota Tenggarong, Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Museum Mulawarman adalah istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun pada tahun 1963 sebagai pengganti Istana sebelumnya yang terbakar dan diresmikan pada tanggal 25 November 1971 kemudian diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Februari 1976.

- **Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser**

Kabupaten Paser memiliki keunikan budaya dan keindahan alam termasuk wisata sejarah dimana salah satu daya tarik wisata adalah Museum Sadurengas. Museum Sadurengas merupakan bekas Istana Kesultanan Paser yang terletak di Pusat Kecamatan Paser Belengkong. Museum tersebut menjadi ikon daerah Kalimantan Timur wilayah selatan mengingat Kesultanan Sadurengas memiliki sejarah panjang di wilayah Kalimantan Timur.

- **Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau**

Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung pada dasarnya merupakan satu kerajaan (Kerajaan Berau) yang terpisah pada keturunan ke-13 (tahun 1810) pada silsilah kerajaan tersebut. Kedua kerajaan ini memiliki lokasi yang tidak berjauhan dimana hanya dipisahkan oleh pertemuan dua sungai yakni Sungai Segah dan Sungai Kelay. Kedua kerajaan tersebut mewariskan peninggalan sejarah berupa museum yang keduanya merupakan bekas istana kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung. Pemerintah Kabupaten Berau masih konsisten menjaga warisan kebudayaan ini sehingga kondisi museum (kesultanan) tetap terawat. Selain itu, meskipun beberapa kali dilakukan pemugaran di beberapa titik, namun pemerintah daerah tetap menjaga keaslian bangunan historis tersebut



- **Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda**

Pada bulan Juni 1991, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H.M. Ardans mencanangkan dan meresmikan Desa Pampang sebagai Desa Budaya. Melalui desa ini, pemerintah berharap Provinsi Kalimantan Timur tetap memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Pemerintah juga merasa antusias bahwa desa budaya ini memiliki kegiatan positif yang bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Desa Budaya Pampang diharapkan dapat dijadikan sebagai cagar budaya guna mengoptimalkan nilai sosial dan budaya tempat tersebut.

- **Koridor Sungai Mahakam**

Kawasan Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu: Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Kersik Luway, Lamin Eheng di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam upaya meningkatkan apresiasi seni/budaya bernilai tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengelolaan terhadap kawasan strategis ini juga perlu dipertimbangkan dari aspek apresiasi nilai seni/budaya bernilai tinggi yang menghasilkan peluang ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan kawasan strategis harus melibatkan berbagai pihak dengan pembagian peran dan kepentingan sesuai dengan tupoksinya, yakni pihak yang berkepentingan terhadap nilai seni/budayanya (benda/ objeknya), terhadap wilayahnya (ruang spasial), dan terhadap investasi ekonomi (bisnis pariwisata).

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

- **Kawasan 3 (tiga) Danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan Sekitarnya)**

Permasalahan utama danau-danau di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingginya tingkat sedimentasi bahkan tiga danau besar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Malintang (11.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha), dan Danau Jempang (15.000 ha), memiliki tingkat sedimentasi tinggi yang mencapai sekitar 70 persen total kawasan. Tingginya tingkat

sedimentasi menyebabkan kedalaman air yang tersisa hanya sekitar setengah hingga dua meter yang menyebabkan berkurangnya fungsi danau sebagai kawasan resapan air. Dengan demikian, resiko banjir akan meningkat pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau padang delta yang mencuat ke permukaan kian meluas. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas industri perhutanan di daerah aliran sungai di sebelah hulu kawasan danau memicu sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan.

- **Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam - Balikpapan)**

Kawasan Teluk Balikpapan merupakan kawasan di sekitar Sepaku-Penajam-Balikpapan yang berada di barat Selat Makassar atau tepi barat daya dari Samudera Pasifik. Kawasan ini memiliki berbagai pelabuhan umum maupun pelabuhan swasta (Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri) sebagai penunjang aktivitas perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa pelabuhan umum yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Semayang, penumpang dan kargo umum (general cargo) terbesar bagi Kota Balikpapan;
- b. Pelabuhan Kampung Baru, Pelabuhan Penyeberangan Penumpang ke Penajam Khususnya kapal-kapal speedboat sebuah pelabuhan yang melayani penumpang kapal feri ke Sulawesi;
- c. Pelabuhan Kariangau, sebuah pelabuhan feri ke Kota Penajam; dan
- d. Pelabuhan Penajam, sebuah pelabuhan feri ke Kota Balikpapan.

Beberapa pelabuhan swasta yang berada di Kawasan Teluk Balikpapan seperti:

- a. Pelabuhan Pertamina, di bagian timur
- b. Pelabuhan Chevron, di bagian barat
- c. POSB, Petrosea Offshore Supply Base di kawasan Kariangau
- d. Beberapa Terminal khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri, Beberapa perusahaan pertambangan batubara memiliki pelabuhan pribadi pada bagian barat dan utara.

- **Kawasan Delta Mahakam**

Kawasan Delta Mahakam meliputi enam kecamatan yaitu: Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Angana, Muara Badak, dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan meliputi perikanan (pertambakan), pertambangan energi, sentra industri, dengan bidang penunjang utama pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Pusat pengembangan kawasan Delta Mahakam ini adalah Muara Badak.

- **Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan Sekitarnya**

Kawasan Pariwisata Pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus Kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

- **Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat**

Karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan bentang alam kompak dan tak terpisahkan yang meliputi 2 kabupaten (Kutai Timur dan Berau), 13 kecamatan dan 111 desa. Kawasan tersebut merupakan hulu dari lima sungai utama di Berau dan Kutai Timur yaitu Sungai Talabar, Sungai Lesan, Sungai Pesab, Sungai Bengalon dan Sungai Karang, dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat khususnya bagi pesisir Mangkalihat.

- **Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan**

Kepulauan Balabalagan merupakan suatu kawasan wisata yang memiliki daya tarik wisata bahari yang terletak pada perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Potensi wisata bahari yang ditawarkan hampir menyerupai kepulauan Derawan, Kabupaten Berau dimana terdapat beberapa pulau yang layak untuk dikunjungi, keindahan

pantai, batu karang, pasir putih, hingga spesies ikan dan penyu yang masih terjaga ekosistemnya.

### **c. Wilayah Rawan Bencana**

Potensi kejadian bencana Nasional di Daerah, kemungkinan besar akan terjadi mengingat Aset Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di wilayah 10 Kabupaten/Kota. Potensi ancaman bencana yang diperkirakan antara lain bencana kegagalan teknologi meledaknya kilang minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek Vital Nasional. Potensi ancaman bencana tingkat Regional di daerah kemungkinan besar terjadi untuk bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Potensi ancaman bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

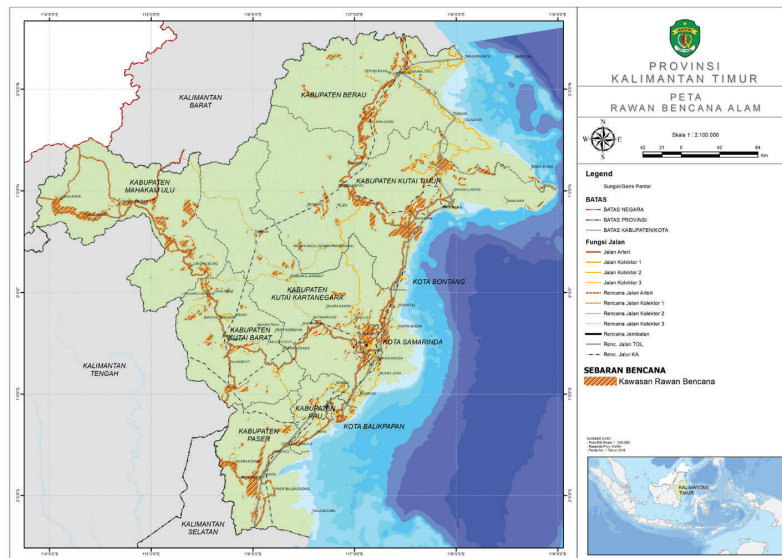
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020 (sumber BNPB) bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang kaya akan sumber daya energi dan mineral ini memiliki potensi bencana yang beragam. Hal tersebut terlihat dari kejadian bencana yang pernah terjadi berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 10 jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Berdasarkan sejarah kejadian bencana tersebut diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih mempunyai potensi bencana yang cukup besar.

Adapun berdasarkan DIBI dan keadaan wilayah, potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang esktrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, tanah longsor dan tsunami.

Sepuluh jenis bencana tersebut pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kejadian bencana tsunami, belum pernah terjadi, namun dikatakan berpotensi karena dilihat dari parameter ukur yang ada pada metodologi pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana Provinsi

Kalimantan Timur akan dilakukan terhadap 11 jenis bencana yang teridentifikasi mengancam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur**



Sumber : Jaringan Informasi Geospasial Daerah Prov. Kaltim, diolah kembali, 2018

### 2.1.2 Aspek Demografi

Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.505.161 jiwa yang tersebar di 7 kabupaten dan 3 kota. Samarinda, sebagai ibukota provinsi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kabupaten terbaru hasil pemekaran, memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kalimantan Timur. Penduduk Kaltim didominasi oleh kelompok usia 5-39 tahun dengan proporsi masing-masing sekitar 8-9 persen sedangkan penduduk di atas usia 70 tahun menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah kurang dari 1 persen. Struktur penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim memiliki proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Artinya Kalimantan Timur memiliki peluang dalam hal penyediaan tenaga kerja. Dalam hal ini Kaltim tengah menghadapi bonus demografi yang memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat apabila mampu memanfaatkan peluang ini dengan baik. Tentunya Sumber Daya Manusia yang ada harus dibekali dengan pendidikan dan keahlian agar mampu berdaya saing dan produktif.

Secara umum, jumlah penduduk di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2013-2017) dengan rata-rata pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara itu kepadatan penduduk di Kalimantan Timur pada tahun 2017 mencapai 27,26 jiwa per Km<sup>2</sup>, dengan Kota Samarinda sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.495,39 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kondisi ketimpangan wilayah dari sisi demografi terjadi di 10 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Bila diakumulasikan jumlah penduduk yang berada pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang sebanyak 1.650.069 jiwa atau sebesar 46,15% dari penduduk Kalimantan Timur. Jumlah Persentase ketiga Kota tersebut tersebut hampir menyamai jumlah penduduk yang berada di 7 (tujuh) kabupaten lainnya yaitu sebanyak 1.925.380 atau sebesar 53,85 % dari Penduduk Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan persebaran penduduk masih belum merata.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

### **2.2.1 Fokus Pemerataan Ekonomi**

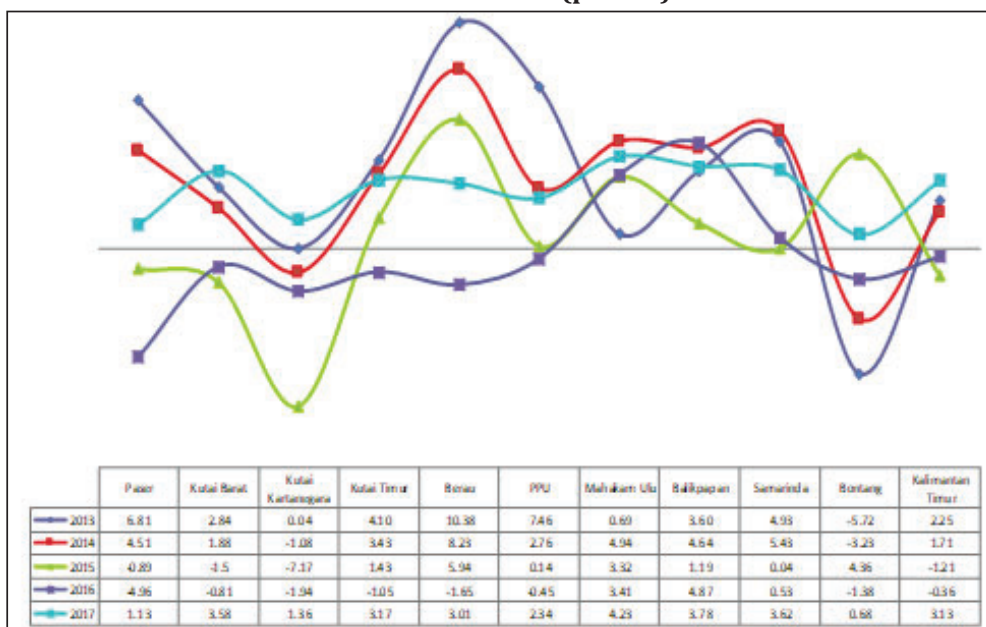
Besarnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDRB Kalimantan lantas tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tentunya, hal ini diakibatkan oleh tingginya ketergantungan ekonomi Kaltim pada sektor migas dan batubara. Oleh karena itu, kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba di pasar internasional. Maka saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015,

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen.

Seiring membaiknya harga komoditas minerba, perekonomian Kalimantan Timur mulai merangkak naik di tahun 2016. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen.

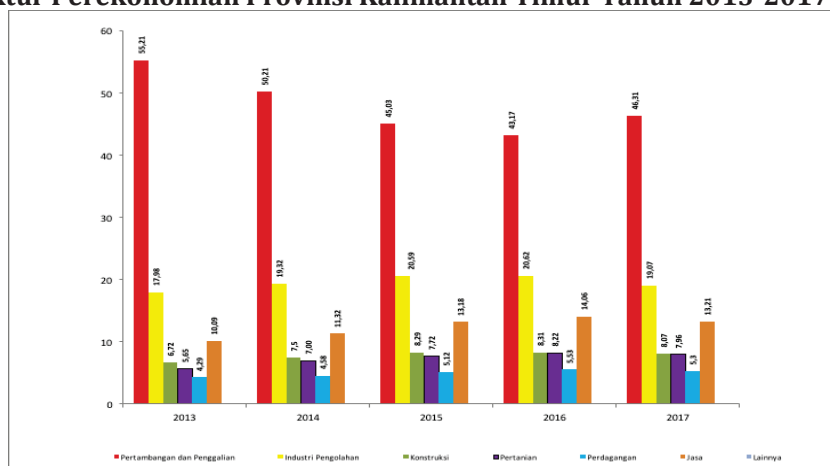
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuatif. Beberapa Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan yang berada dibawah provinsi antara lain Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Berau.

**Grafik 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (persen)**



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

**Grafik 2. 2**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)**



Sumber : BPS Prov. Kaltim

Berdasarkan grafik di atas, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta lapangan usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur. Mengingat migas dan batubara merupakan sumber daya yang akan habis jika dieksploitasi terus menerus, maka perlu adanya sektor lain yang dapat menggantikan perannya.

Dilihat dari kontribusinya, lapangan usaha Konstruksi dan Pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat peranannya terhadap PDRB Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kontribusi lapangan usaha Pertanian yang cenderung meningkat menjadi harapan dalam mendukung transformasi ekonomi Kaltim. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub perkebunan tahunan, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu.

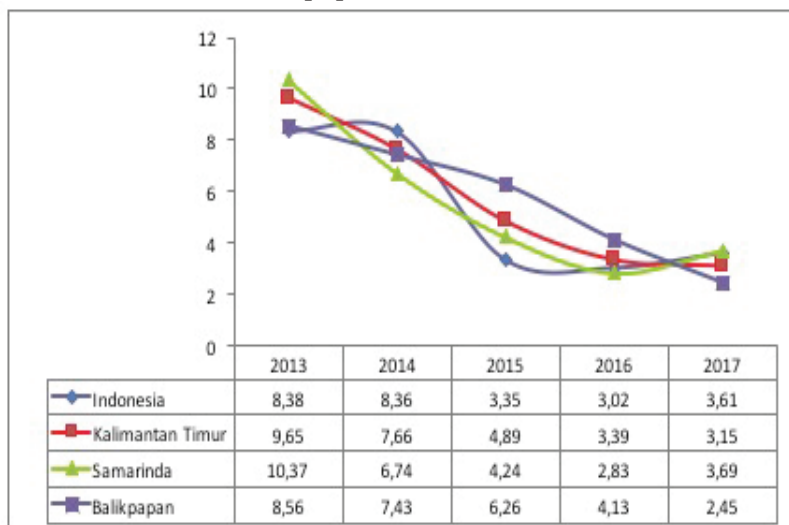
Perlu diketahui bahwa share lapangan usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan



penggalan, namun kontribusinya masih sangat kecil, pada tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 5,30 persen.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Laju inflasi pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,02 %.

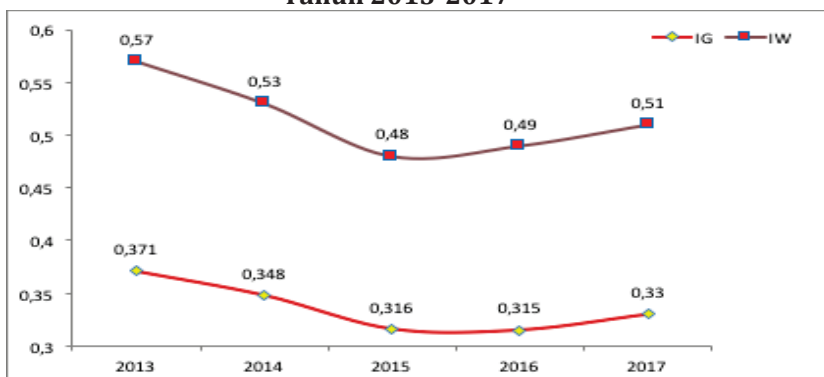
**Grafik 2. 3**  
**Laju Inflasi Kalimantan Timur,**  
**Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)**



*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Laju inflasi Kota Samarinda dan Kota Balikpapan sangat berfluktuasi. Dilihat dari tren nya, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan menunjukkan besaran inflasi yang menurun dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2017, inflasi di Kota Balikpapan lebih rendah dari inflasi Kaltim, sedangkan inflasi Kota Samarinda menunjukkan sebaliknya.

**Grafik 2. 4**  
**Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**



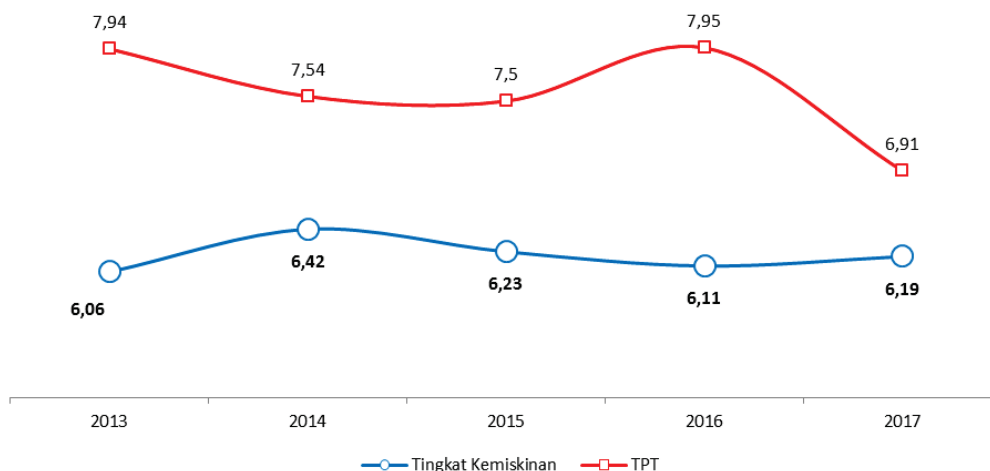
Sumber : BPS Provinsi Kaltim dan Data diolah

Kemudian jika dilihat tren pencapaian Indeks Gini dan Indeks Williamson Kalimantan Timur memiliki fluktuasi yang serupa. Indeks gini dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sedangkan indeks williamson dipengaruhi oleh pendapatan per kapita di daerah. Indeks Gini Kaltim selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,330. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Williamson selama 2013-2017 juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan ketimpangan menjadi sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kaltim masih relatif tinggi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut. Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Selama periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Kaltim tercatat sebesar 6,06 persen, meningkat cukup tinggi ditahun 2014 menjadi sebesar 6,42 persen dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi sebesar 6,19 persen namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

**Grafik 2. 5**  
**Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



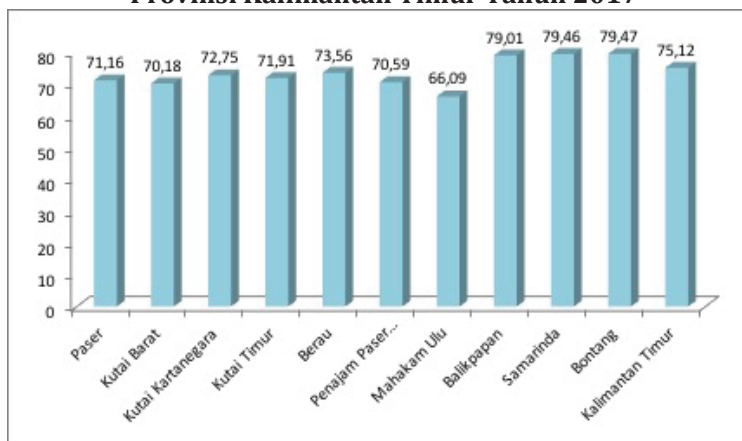
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pengeluaran, sedangkan pengeluaran masyarakat terkait dengan jumlah pendapatan. Berbasis pada logika tersebut, maka strategi penurunan kemiskinan di beberapa daerah dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan. Pada saat kinerja ekonomi Kaltim mengalami kontraksi terutama pada tahun 2015 dan 2016, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 7,95 persen. Namun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian Kaltim di tahun 2017, TPT Kaltim juga menurun menjadi sebesar 6,91 persen. Maka, untuk arah pengembangan ekonomi Kaltim juga harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan selama periode 2013-2017, lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan menempati posisi ketiga IPM Nasional.

Namun, jika dilihat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten memiliki nilai IPM dibawah IPM Provinsi. Hanya wilayah kota yang memiliki nilai IPM di atas IPM Provinsi. Maka, pemerataan pembangunan masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup di wilayah kabupaten perlu ditingkatkan terutama pada daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

**Grafik 2. 6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**



*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur*

Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin dan telah melampaui capaian provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, sedangkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena hanya naik sebesar 0,49 tahun. Jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia sekolah di Kaltim masih berkisar pada jenjang pendidikan SMP.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Berkembangnya keolahragaan di Kalimantan Timur dapat dilihat dari capaian prestasi olahraga Kaltim dalam kejuaraan tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016 dimana Kaltim menempati posisi ke lima dari 34 provinsi. Peringkat Kaltim di PON 2016 tidak jauh berbeda dengan PON 2012 di Bengkulu yang juga menempati posisi kelima. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keolahragaan sudah menjadi bagian

dari kehidupan masyarakat Kaltim. Selain itu, capaian prestasi olahraga tersebut juga ditopang oleh adanya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai.

Secara umum, jenis olahraga yang paling populer adalah olahraga terukur seperti lari, renang, angkat besi, lompat tinggi, dan sebagainya. Olahraga ini paling banyak memiliki klub olahraga dan atlet dengan jumlah sarana dan prasarana sekitar 24 buah. Sedangkan olahraga lain yang juga populer di Kalimantan Timur adalah olahraga beladiri seperti taekwondo, silat, dan lain-lain dengan jumlah atlet profesional lebih dari 260 orang dan terdapat 11 klub. Di samping itu, olahraga lain seperti permainan dan olahraga beregu juga tetap menjadi minat yang populer.

Sejalan dengan capaian prestasi dalam bidang keolahragaan, capaian indeks pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan dari angka 50,83 pada tahun 2015 menjadi 56,33 pada tahun 2016.

Sementara itu, terkait dengan kondisi sanggar seni dan budaya di Kalimantan Timur yang mencakup grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih belum aktif. Selain itu, juga terdapat sanggar kesenian yang tidak terdaftar walaupun keberadaannya tetap eksis sampai sekarang. Adapun event seni budaya yang sering diselenggarakan di Kalimantan Timur diantaranya Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Budaya Dayak Kenyah.

## **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**

#### **1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **a. Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur pada usia pendidikan dasar dan lanjutan memiliki capaian yang baik. Namun jika

dilihat lebih lanjut pada partisipasi pendidikan masyarakat di tingkat menengah atas perlu mendapat sorotan yang lebih terutama jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Capaian APM dan APK Kalimantan Timur jika dilihat secara jenjang yang lebih khusus (SMA, SMK dan MA) tidak berada di atas 90 persen.

**Tabel 2. 3**  
**APM dan APK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni SMA	76,49	76,49	76,25	75,00	74,25
Angka Partisipasi Kasar SMA	87.90	87.51	87.90	88.00	87.93
Angka Partisipasi Murni SMK/MAK	76.49	76.49	76.25	75.00	74.25
Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	87.90	87.51	87.90	88.00	87.93

Sumber : Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Prov. Kaltim

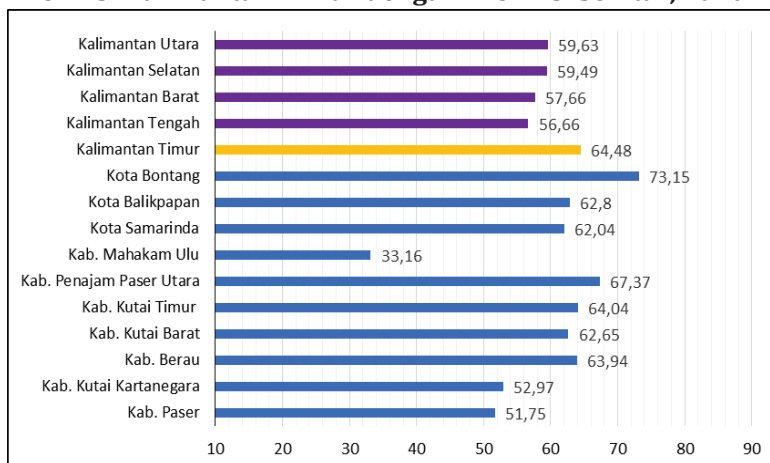
Secara umum capaian APK Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun, APK Kaltim meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 9,56 persen. Selain itu, capaian APK Provinsi Kaltim sudah melampaui APK Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK sederajat telah menunjukkan kondisi yang membaik meski belum mendekati angka 100 persen.

Meskipun capaian APK Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan provinsi sekitar, tetapi APK kabupaten/kota masih terlihat timpang. Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa tiga kabupaten masih memiliki APK dibawah 90 persen yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Paser serta Kota Balikpapan. Pertumbuhan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu yang paling lambat yaitu sebesar 12,6% setelah Kutai Barat sebesar 10,67% selama periode 2013-2017. Sedangkan APK Kabupaten Mahakam Ulu naik sebesar 15,46%. Ketiga daerah tersebut merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan APK SMA/MA/SMK sederajat paling rendah. Sedangkan pertumbuhan APK Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang juga tidak terlalu signifikan dalam periode lima tahun yaitu rata-

rata hanya 7%. Oleh karena itu, APK di tiap kabupaten/kota di Kaltim terlihat tidak setara sehingga terdapat daerah dengan APK sangat tinggi dengan pertumbuhan yang juga tinggi, tetapi juga terdapat daerah dengan APK sangat rendah dengan pertumbuhan yang relatif lambat.

Sama halnya dengan APK, capaian APM Provinsi Kalimantan Timur juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan kenaikan pada capaian APK. Selama lima tahun, capaian APM Kaltim meningkat sebesar 6,29 persen dari tahun 2013 hingga 2017. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antara APK dan APM yaitu sebesar 25,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan SMA tidak diikuti dengan kesesuaian umur peserta didik dengan golongan umur yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh adanya peserta didik di SMA/SMK/MA yang tinggal kelas atau mengulang atau juga bisa disebabkan oleh adanya siswa melakukan percepatan sehingga umur peserta didik tersebut lebih muda daripada golongan umur yang seharusnya masuk jenjang SMA.

**Grafik 2. 7**  
**Perbandingan APM tiap Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sekitar, Tahun 2017**



*Sumber: Data APK APM Kemdikbud 2013-2018, diolah*

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, secara komparatif, APM Kaltim untuk jenjang SMA/MA/SMK sudah lebih baik dibandingkan provinsi sekitar, namun demikian ketimpangan capaian APM masih terlihat di antara kabupaten/kota. Pada tahun 2017, masih terdapat kabupaten dengan nilai APM sangat rendah seperti Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai APM kurang dari 50. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang sudah memiliki nilai APM pada angka 50 yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari *trend*-nya selama lima tahun, maka ketimpangan kenaikan capaian APM akan semakin terlihat. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa beberapa kabupaten tidak mengalami kenaikan capaian APM dan bahkan cenderung turun. Oleh karena itu, beberapa kabupaten/kota dengan nilai APM paling kecil dan kenaikannya yang paling rendah harus menjadi perhatian karena hal tersebut mencerminkan disparitas kualitas pendidikan di Kaltim. Daerah yang harus menjadi prioritas perbaikan layanan pendidikan berdasarkan adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Kutai Barat karena nilai APK dan APM dan pertumbuhannya selalu menjadi yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

#### **b. Kesehatan**

Angka kesakitan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) tidak menunjukkan banyak perubahan. Hal ini tidak bisa menjadi ukuran secara riil mengenai derajat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Namun setidaknya bisa menggambarkan bahwa kesehatan masyarakat di Kaltim berada dalam posisi yang baik karena capaian ini lebih rendah dari daerah lainnya.

**Tabel 2. 4**  
**Angka Kesakitan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kesakitan	11,74	9,18	9,18	11,9	11,9

Sumber : Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Prov. Kaltim



Perihal kesehatan masyarakat, ternyata tercatat bahwa jumlah penderita penyakit tidak menular di Kalimantan Timur cukup tinggi bahkan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 Kaltim mengalami peningkatan pada penyakit tidak menular seperti Stroke, Hipertensi (HT) dan Diabetes Melitus (DM), bahkan untuk stroke menjadi provinsi tertinggi kejadian stroke, peringkat 2 tertinggi untuk kejadian DM, dan peringkat ketiga untuk HT. Upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat dilakukan pendeteksian dini PTM melalui Posbindu yang telah ada di seluruh Puskesmas di Kalimantan Timur, hanya saja yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Posbindu, ketersediaan logistic/BHP guna pemeriksaan kesehatan di Posbindu, sehingga perlu pemenuhan hal tersebut diatas guna meningkatkan cakupan deteksi dini pada faktor resiko PTM, sehingga jika deteksi dini ini baik akan membantu dalam pengendalian PTM di Kaltim.

#### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi serta penataan ruang.

##### **1) Jalan dan Jembatan**

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dilihat dari dua aspek ketersediaan dan kualitas belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan belum mampu menjangkau seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Selain itu, kualitas jaringan jalan terbangun belum optimal yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan.

Sebagian besar infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur berstatus jalan kabupaten/kota. Pada tahun 2017, sebesar 81,8% dari total panjang jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, proporsi panjang jalan nasional dan jalan provinsi pada tahun yang sama masing-masing sebesar 11,9% dan 8,5%.

Panjang jalan yang berada dalam kewenangan provinsi mengalami stagnasi pada angka 1.570,07 km pada periode 2013-2017. Capaian tersebut belum mampu menghubungkan 8 Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No 1 tahun 2016) secara baik. Saat ini, belum semua pusat produksi, kawasan industri, dan outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan.

Persoalan lain yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan jalan adalah belum optimalnya keterhubungan jalan antar kabupaten. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan distribusi alat berat menjadi lebih mahal.

**Tabel 2. 5**  
**Panjang Jalan (Km) Provinsi Menurut Kondisi**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	428.45	27.29	387.60	24.69	380.21	24.22	373.81	23.81
2016	149.97	9.55	720.54	45.89	500.52	31.88	269.04	17.14
2015	452.98	28.85	329.52	20.99	251.39	16.01	536.68	35.83
2014	456.86	29.10	339.57	21.63	359.21	22.88	414.43	26.40
2013	440.48	28.05	334.85	21.33	249.75	15.91	544.99	34.71

*Sumber: Diolah dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Kualitas jalan provinsi belum terlalu baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 hanya 27,29%. Kondisi jalan pada tahun yang sama didominasi oleh jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang mencapai 48,03%. Tingginya kerusakan jalan provinsi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksesuaian konstruksi jalan dengan standar kenyamanan, belum optimalnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi serta tingginya pelanggaran batas muatan kendaraan.

Persoalan lain mempengaruhi ketidakoptimalan kualitas jaringan jalan adalah minimnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan terbangun. Hal ini dapat dilihat dari panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang hanya menurun 11,3% pada periode 2013-2017. Selain itu, kerusakan jalan juga disebabkan oleh tingginya pelanggaran batas muatan pada ruas-ruas tertentu.

Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, masing-masing mencapai 135,22 km dan 112 km pada tahun 2017. Angka tersebut mengindikasikan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak berat di kedua wilayah mencapai 36% dan 30% secara berurutan terhadap total panjang jalan provinsi dalam kondisi yang sama. Sementara itu, mayoritas jalan dalam kondisi rusak pada tahun 2017 berada di Kabupaten Paser yang mencapai 36% terhadap total panjang jalan provinsi dalam kondisi yang sama. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar panjang jalan provinsi di daerah tersebut berada dalam kondisi rusak (88,4%).

Kota Samarinda merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada daerah tersebut mencapai 56%. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

## **2) Sumber Daya Air**

Pengelolaan air dan sumber daya air berperan sangat penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, dapat terlihat dari masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Pada tahun 2017, luas lahan yang terairi sebesar 14.928 ha. Kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa belum semua lahan pertanian membutuhkan yang terairi jaringan irigasi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan jaringan irigasi. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi dan ketidaksesuaian ketersediaan jaringan irigasi dengan lahan pertanian strategis. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting.

Persoalan berikutnya terkait kebutuhan air baku untuk irigasi adalah belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi. Luas irigasi berdasarkan kondisi di Kalimantan Timur yang berpotensi mencapai 58.943 ha dan fungsional sebesar 14.928 ha. Kebutuhan irigasi sebesar 166.855 ha untuk memenuhi kebutuhan 3.575.449 jiwa penduduk dengan konsumsi beras 112,00 kg/tahun. Kebutuhan konsumsi beras sebesar 400.451 ton/tahun dengan produksi beras per hektar adalah 2,4 ton per sekali tanam.

Permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dapat dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum.

**Tabel 2. 6**  
**Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan**

NO	KABUPATEN/KOTA	Persentase penduduk yang terlayani air bersih perpipaan		
		2015	2016	2017
1	PASER	15.882	18.743	19.050
2	PENAJAM PASER UTARA	4.798	5.339	5.470
3	SAMARINDA	127.633	137.135	146.225
4	BALIKPAPAN	87.999	95.781	97.243
5	KUTAI KERTANEGARA	65.026	69.942	68.035
6	KUTAI BARAT	9.560	9.987	10.012
7	KUTAI TIMUR	17.727	20.656	15.945
8	BERAU	13.159	16.120	16.517
9	BONTANG	19.212	22.970	23.999
10	MAHAKAM ULU	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>360.996</b>	<b>396.673</b>	<b>402.496</b>

*Sumber: Data Sektor Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Terbatasnya akses air bersih terutama untuk air minum lebih disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Persoalan ini salah satunya dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota. SPAM dapat dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota kemudian dikelola dan disalurkan.

Cakupan layanan air minum melalui jaringan PDAM Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya optimal terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten yang sudah terlayani dengan cukup baik antara lain Samarinda dengan cakupan layanan air minum sebesar 95,46%. Persoalan cakupan layanan air minum yang belum optimal, membuat masyarakat lebih memilih air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum.

### 3) Banjir dan Abrasi

Hampir semua kota di Kalimantan Timur pernah mengalami permasalahan banjir kecuali Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Daerah rawan banjir di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 7**  
**Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur**

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

*Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Tingginya kejadian banjir disebabkan oleh belum memadainya infrastruktur pengendali banjir dan masih rendahnya kepedulian

masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir.

Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase yang memadai serta banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

**Tabel 2.8**  
**Perkiraan Volume Sedimentasi di Infrastruktur Pengendali Banjir Kota (Sungai, Kolam Retensi Banjir dan Saluran Drainase)**

No.	Jenis Infrastruktur	Kapasitas/ Panjang	Laju Sedimentasi (mm/th)	Volume Sedimentasi (m <sup>3</sup> /th)
1	Kota Balikpapan			
	- Sungai Ampal	7 Km	0,95	21.613
	- Sungai Klandasan	5 Km	1,1	13.200
	- Sungai Sepinggan	4 Km	1,2	11.520
	- Saluran Drainase Kota	35 Km		10.500
2	Kota Bontang			
	- Sungai Bontang (dalam Kota)	8 Km	1,3	12.480
	- Danau Kanaan	7 Ha	1,3	26.000
	- Saluran Drainase Kota	25 Km		7.500
3	Kota Samarinda			
	- Sungai Karangmumus (dlm Kota)	15 Km	1,25	78.125
	- Sungai Kr.Asam Kecil	6 Km	1,25	12.000
	- Sungai Kr.Asam Besar	8 Km	1,15	34.500
	- Sungai Rapak Mahang	5 Km	1,25	10.000
	- Kolam Retensi Banjir Stadion Semapaja	1 Ha	1,25	13.000
	- Kolam Retensi Banjir Loa Hui	4,5 Ha	1,3	7.280
	- Kolam Retensi Banjir Vorvo	1 Ha	0,6	1.440
	- Saluran Drainase Kota	50 Km		17.500

*Sumber: Data Sektor Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat*

Bertambahnya volume sedimentasi yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan. Pertambahan volume terbesar terjadi di Sungai Karangmumus dan Sungai Kr. Asam Besar Kota Samarinda. Salah satu faktor penyebab

terjadinya sedimentasi di wilayah perkotaan adalah karena perubahan penggunaan lahan.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hubungan yang seimbang antara masyarakat dengan pengelolaan lingkungan dapat memacu pengendalian risiko banjir.

#### **d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-13 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Akses masyarakat terhadap permukiman layak huni belum optimal. Hal tersebut terindikasi dari masih adanya kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh. Saat ini terdapat 70 titik kawasan permukiman kumuh, 11 diantaranya berada di bawah kewenangan provinsi yang tersebar di 4 kabupaten/kota.

**Tabel 2. 9**  
**Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1.	Balikpapan	Karang Jati	12,52
2.	Samarinda	Bantaran Sungai Mahakam (D), Kecamatan Seberang	10,36
		Sistem Folder H Kec. Samarinda Ulu	13,05
3.	Bontang	Tanjung Laut Indah	12,32
		Loktuan	14,43
		Guntung	12,05
		Tanjung Laut	12,22
4.	Kutai Kartanegara	Loa Kulu Kota	11,56
		Loa Sumber	
		Jembayan	
		Muara Jawa Pesisir	15,06
	Jumlah		113,55

Sumber: SK Kumuh dan Numerik Kumuh KOTAKU 2018



Total kawasan pemukiman kumuh yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi (10-15 Ha) mencapai 113,55 Ha. Sebagian besar kawasan tersebut berada di Kota Bontang yang mencapai 51,02 Ha atau 38,9 persen dari total luas kawasan pemukiman kumuh provinsi. Kawasan pemukiman kumuh juga tersebar di dua kota lainnya yaitu Kota Samarinda dan Balikpapan, masing-masing sebesar 11,8 persen dan 10,39 persen. Sementara itu, wilayah pemukiman kumuh juga berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di empat lokasi yang mencapai 26,62 Ha atau 23,5% dari luas kawasan pemukiman kumuh provinsi. Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Selain itu, ketidakefektifan akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni juga disebabkan oleh rendahnya upaya penataan pemukiman. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya cakupan pemukiman yang tertata. Sampai tahun 2017, hanya 1.045,14 Ha atau 2,38 persen dari luas kawasan pemukiman keseluruhan yang telah tertata.

Belum optimalnya penataan pemukiman disebabkan oleh beberapa hal. Persoalan utama yang terjadi adalah belum optimalnya upaya relokasi pemukiman tidak layak di beberapa titik sepanjang sempadan sungai, kawasan padat di perkotaan, kawasan sepanjang garis pantai, kawasan lindung, kawasan rawan bencana. Kondisi ini mengakibatkan pemenuhan infrastruktur dasar pemukiman layak huni belum memadai. Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah.

Data mengenai rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 10**  
**Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Verifikasi	
		Verifikasi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)
Paser	72.324	0	4.476
Kutai Barat	44.729	16.247	0
Kutai Kartanegara	183.156	0	19.183
Kutai Timur	83.060	23.892	20.451
Berau	50.510	0	523
Penajam Paser Utara	39.129	8.817	1.028
Mahakam Hulu	7.778	0	535
Balikpapan	161.892	0	359
Samarinda	236.778	0	5.167
Bontang	50.896	0	0
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>930.252</b>	<b>48.956</b>	<b>51.722</b>

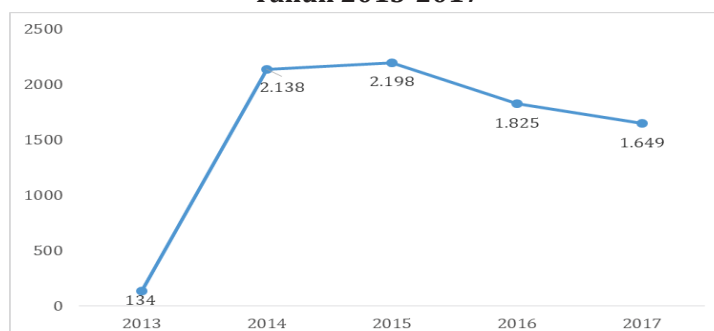
Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

#### e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketersedian Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui grafik berikut:

**Grafik 2. 8**  
**Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jumlah Satpol PP di Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 134 personil pada tahun 2013 menjadi 2.138 personil pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1.649 personil.

Rasio Polisi Pamong Praja per satuan penduduk per 10.000 penduduk pada tahun 2017, dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 4 orang personil polisi pamong praja. Penurunan rasio tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah polisi pamong praja yang ada.

Begitu juga dengan jumlah petugas Linmas yang saat ini mengalami penurunan. Padahal Sat Linmas berfungsi untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Hal tersebut tentu memberi dampak pada tingkat ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

#### **f. Sosial**

Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kondisi PMKS di Provinsi Kalimantan Timur dapat dipaparkan melalui beberapa indikator yaitu: jumlah PMKS, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase PMKS yang ditangani.

**Tabel 2. 11**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Rincian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS (orang)	120.971	113.807	113.807	247.167	243.459
PMKS Yang Ditangani (orang)	26	26	26	26	75.696
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	0,02 %	0,02%	0,02%	0,01%	31,09%
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan (orang)	355.636	355.636	355.636	78.690	76.000
PMKS yang diberikan bantuan (orang)	23,69	14,12	14,12	54,67	99,60
PMKS yang memperoleh bantuan Sosial (%)	n/a	n/a	n/a	51%	n/a

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id*

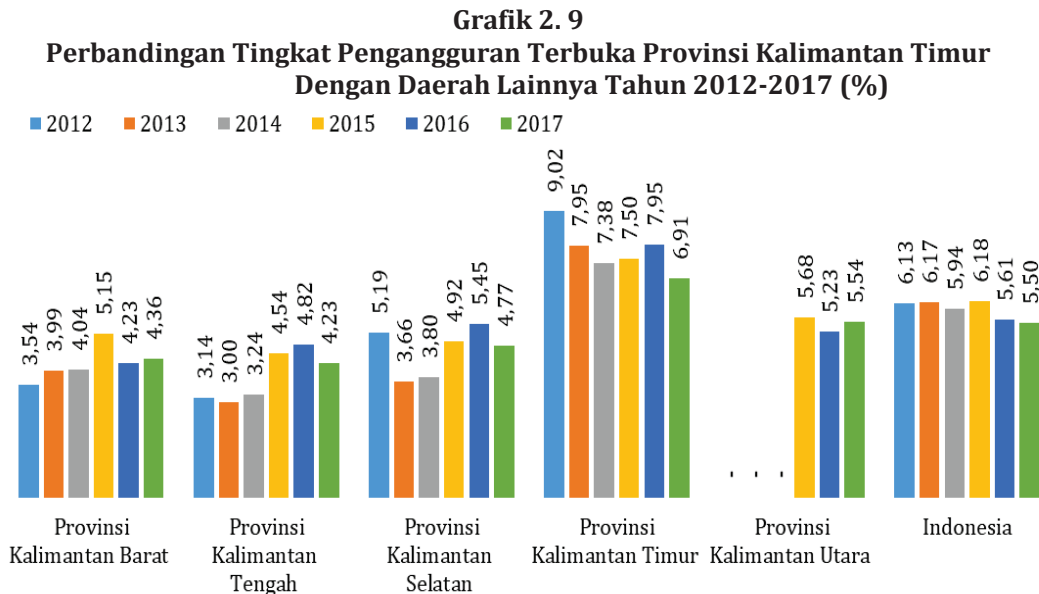
Jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami permasalahan tingginya penduduk PMKS. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan, rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial, belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan panti sosial, rendahnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial. Berdasarkan hasil kompilasi data RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, saat ini belum terdapat Panti Sosial yang khusus melayani Psiko Sosial, sarana dan prasarana Panti Sosial kurang optimal, serta minimnya jumlah pekerja sosial yang ada dalam Panti Sosial sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah 11 aparatur terdiri dari penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat.

## **2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **a. Tenaga Kerja**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator paling penting dibidang ketenagakerjaan. TPT berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tingginya TPT menandakan masih perlu dimaksimalkannya serapan tenaga kerja di

suatu daerah. Capaian mengenai tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur ditampilkan sebagai berikut:



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat 2018*

*Keterangan: data TPT dihitung per Agustus per tahun*

Capaian TPT di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya partisipasi tenaga kerja yang belum terserap secara optimal kedalam lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk dapat menurunkan TPT ke angka yang lebih rendah.

TPT juga berkorelasi dengan tingkat kesempatan kerja (TKK). Gambaran TKK Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 12**  
**Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur (%)**  
**Tahun 2012 - 2017**

Indikator Tenaga Kerja	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Kesempatan Kerja	63.61	92.06	92.46	92,50	n/a	n/a

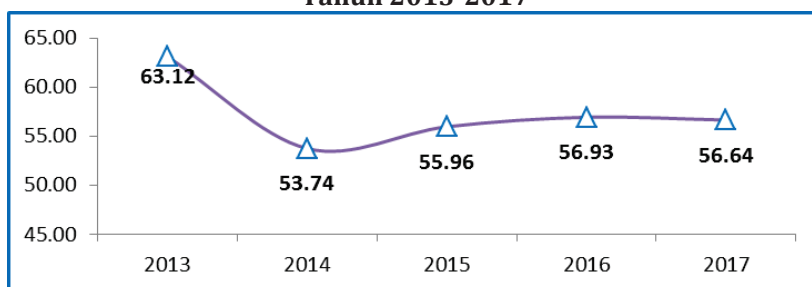
*Sumber: Sakernas-BPS Prov. Kalimantan Timur dan <http://sidata.kaltimprov.go.id>*

Meskipun mengalami kenaikan, kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal terbuka lebar akibat kurangnya pengembangan sektor padat karya secara optimal. Kompetensi tenaga kerja lokal di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu untuk dimaksimalkan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan capaian persentase tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh lulusan SLTA umum/kejuruan. Sementara itu, capaian tenaga kerja pada tahun 2017 berdasarkan pendidikan diploma/sarjana (pendidikan tinggi) di Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 10,77 persen. Pada konteks ini, capaian tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi tenaga kerja lokal masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan kualifikasi dan kualitas tenaga kerja masih rendah, serta kapasitas pelatihan yang diberikan Balai Latihan Kerja (BLK) masih belum optimal. Disamping itu, keterampilan untuk berwirausaha yang masih rendah juga menjadi salah satu yang menjadi kendala.

#### **b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dapat dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

**Grafik 2. 10**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Selama lima tahun terakhir, capaian indeks pemberdayaan gender mengalami penurunan yaitu dari 63,12% di tahun 2013 menjadi 56,64% di tahun 2017. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

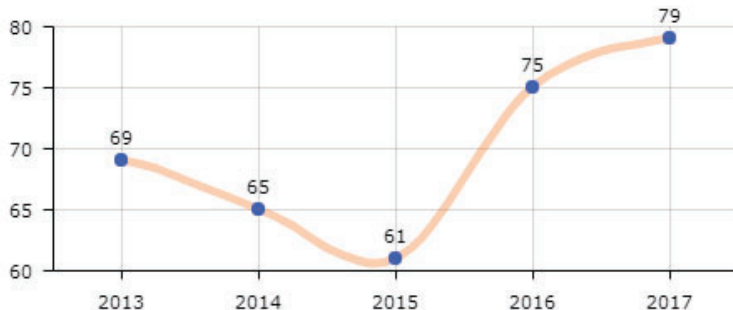
Terkait dengan pelayanan publik ramah anak, Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Beberapa daerah telah menjadi pengembang Kabupaten/Kota layak anak kecuali Kabupaten Kutai Timur, Kutai barat dan Mahakam Hulu.

### c. Pangan

Ketahanan pangan khususnya beras dan daging di Provinsi Kalimantan belum mencapai titik optimal. Ketahanan pangan berhubungan erat dengan urusan kesehatan dan rumpun urusan ekonomi yang menjadi basis bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur harus terus ditingkatkan karena sebagian besar pangan utama berasal dari luar daerah. Belum optimalnya stok cadangan pangan beras menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab bagi ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan yang menurun akan berimplikasi pada persoalan kesehatan dan ekonomi.

**Grafik 2. 11**  
**Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2013-2017 (%)**

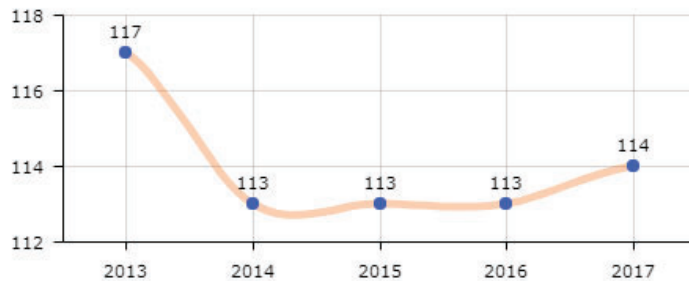


Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur juga perlu menjadi perhatian utama untuk diintervensi. Ketersediaan pangan

perkapita erat dengan persoalan kemiskinan. Pemenuhan terhadap ketersediaan pangan per kapita secara merata dapat mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pangan.

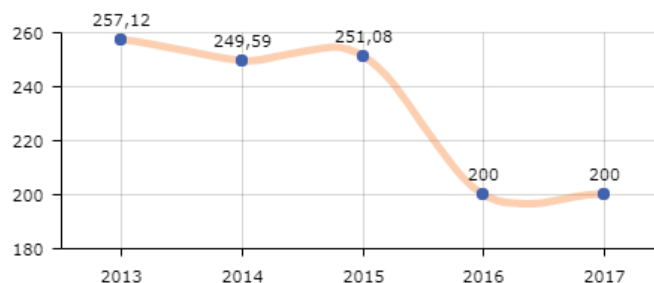
**Grafik 2. 12**  
**Ketersediaan Pangan Perkapita di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (Ton)**



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>

Stok beras sebagai bahan makanan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 2,93%. Kenaikan sebesar 0,6% terjadi pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan tajam sebesar 20,34%. Tahun 2017 stok beras di Kalimantan Timur tetap berada pada angka yang sama seperti tahun 2016. Stok beras di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Beras dari dalam daerah hanya mampu memenuhi stok sebesar 61% dengan tingkat produksi yang fluktuatif karena sebagian besar berasal dari sawah tadah hujan. Umur padi yang panjang juga menjadi penentu stok pangan beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 2. 13**  
**Stok Beras Sebagai Bahan Makanan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (Ton)**



Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>



Rendahnya akses terhadap pangan menjadi persoalan tingkat kedua yang dihadapi setelah ketersediaan pangan. Terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi permasalahan akses pangan. Akses terhadap pangan berhubungan erat salah satunya dengan stok cadangan pangan.

**Tabel 2. 13**  
**Stok Cadangan Pangan Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur (Ton)**

<b>Tahun</b>	<b>Cadangan Pangan Pemerintah Daerah</b>
2015	112
2016	212
2017	240

*Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017 diolah*

Meskipun mengalami kenaikan, stok cadangan pangan Provinsi Kalimantan Timur belum optimal dalam mencukupi konsumsi pangan. Jumlah pada tahun 2017 mencapai 240 ton tetapi berkurang karena memberi bantuan ke Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 80 ton.

Penyebab lain masih rendahnya akses pangan di Provinsi Kalimantan Timur karena sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur ke sentra pertanian. Panjangnya rantai distribusi pangan dari luar daerah maupun ke dalam daerah juga menjadi salah satu penyebab.

#### **d. Pertanahan**

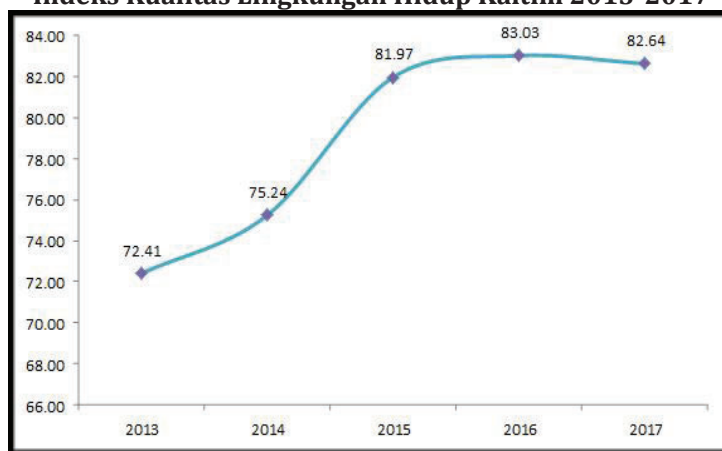
Urusan pertanahan merupakan bagian dari urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan pertanahan termasuk urusan yang penting dalam pembangunan daerah, terutama pada unsur aset, legalitas, hingga adanya persoalan konflik pertanahan. Adanya konflik pertanahan yang perlu menjadi perhatian misalnya terkait batas wilayah dan konflik pertanahan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk terkait konflik tenurial.

#### **e. Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup,

pencapaiannya dalam lima tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur antara lain tergambar pada tabel berikut :

**Grafik 2. 2**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim 2013-2017**

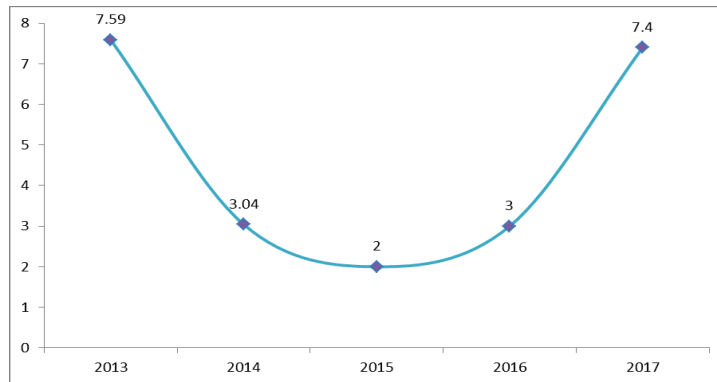


*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018*

IKLH Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebesar 72,41 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 82,64 dengan kategori sangat baik. Kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur selain mengedepankan kemajuan sosial dan ekonomi juga berwawasan lingkungan.

Indeks tutupan hutan Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2011 hingga 2018. Persoalan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingginya alih fungsi hutan dan lahan, tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik, tingginya pencemaran udara, masih tingginya angka emisi GRK dan belum optimalnya penanganan persampahan.

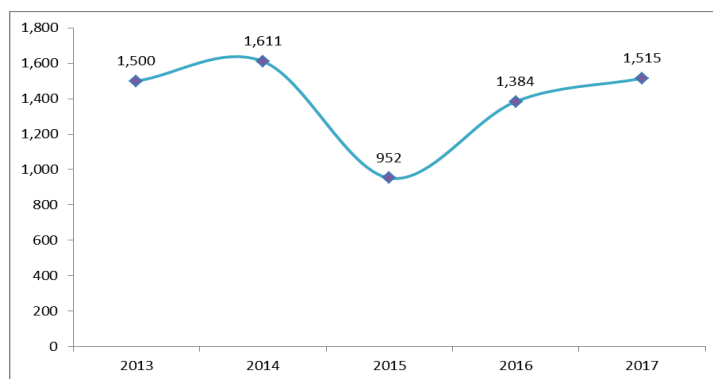
**Grafik 2. 15**  
**Indeks Kualitas Air Kaltim Tahun 2013-2017**



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018*

Masih tingginya emisi GRK di Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah, masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi, masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME dan masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%.

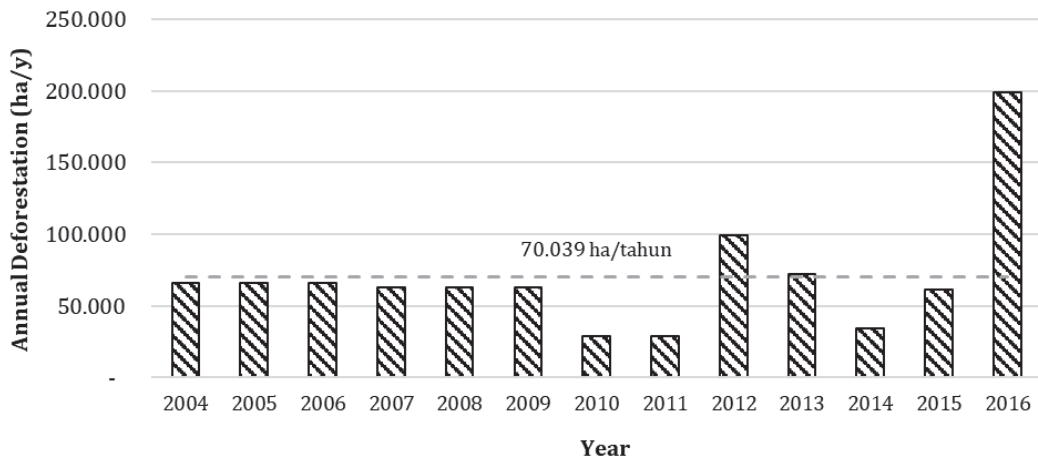
**Grafik 2. 16**  
**Emisi Gas Rumah Kaca Kaltim Tahun 2013-2017**



*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018*

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan yang ditandai dengan meningkatnya laju deforestasi, disebabkan oleh rendahnya pengawasan kawasan lindung, tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha dan rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi.

**Grafik 2. 1**  
**Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur**



*Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017*

Persoalan ini ditandai dengan masih rendahnya reklamasi lahan tambang di Kalimantan Timur.

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki area cadangan karbon tinggi seluas 53.000 ha, sedangkan area cadangan karbon rendah seluas 1.462.000 Ha. Pada konteks penerapan penggunaan biodiesel, hingga saat ini terdapat 2 perusahaan pertambangan yang menerapkan B20 (Biodiesel 20%) PKB2B yaitu Berau Coal dan KPC.

#### **f. Perhubungan**

Dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan urusan perhubungan, lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan.

Akses masyarakat terhadap transportasi umum belum optimal. Hal tersebut dapat terindikasi dari menurunnya jumlah pengguna angkutan umum yang mencapai 15,6% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya peralihan penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor (sebagian besar adalah kendaraan pribadi) cukup signifikan mencapai lebih dari 100.000 unit setiap tahunnya atau meningkat hampir 20% antara tahun 2013-2017. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh rendahnya kenyamanan dalam pelayanan transportasi umum. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Persoalan lain yang juga berpengaruh adalah belum optimalnya ketersediaan moda transportasi. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya peningkatan jumlah angkutan umum yang beroperasi, hanya kurang dari 1% pada tahun 2017.

**Tabel 2. 14**  
**Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum dan Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Angkutan Umum	139.032	139.032	139.054	146.006	146.148	Unit
	Mobil penumpang umum	1.196	1.196	1.266	1.329	1.348	Unit
	Mobil bus	569	569	521	547	547	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.253	Unit
2.	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	10.913.500	10.913.500	9.241.800	12.127.125	10.232.985	Orang
	Jumlah penumpang Bis Tiba	9.268.310	8.820.500	8.959.770	9.859.962	9.227.136	Orang
	Jumlah penumpang Bis Berangkat	8.996.910	9.390.440	8.834.070	9.845.714	8.966.784	Orang
3.	Jumlah Kendaraan Bermotor	2.013.727	2.233.278	2.376.033	2.398.117	2.428.324	Unit

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana perhubungan darat yang memadai. Hal tersebut dapat teridentifikasi dari jumlah terminal tidak mengalami peningkatan pada periode 2013-2017. Sementara itu, upaya peningkatan ketersediaan fasilitas rambu-rambu jalan bahkan mengalami penurunan signifikan sebesar 38% pada tahun 2017.

**Tabel 2. 15**  
**Sarana dan Prasarana Transportasi Darat**

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Terminal	23	23	23	23	23	Unit
	1. Kelas A	2	2	2	2	2	Unit
	2. Kelas B	7	7	7	7	7	Unit
	3. Kelas C	10	10	10	10	10	Unit
	4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1.826.522	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	Orang
2.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit
3.	Jumlah Rambu-rambu yang tersedia	851	1.135	1.549	2.472	2.822	Unit
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	850	284	414	923	350	Unit

Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

Tingkat keselamatan transportasi sangat minim. Hal tersebut dapat terindikasi dari rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan (2.215.500 km). Ketersediaan pagar pengaman jalan hanya 3,87% (3.428 km) dibandingkan dengan total kebutuhan yang mencapai 88.620 km. Kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian serius mengingat fasilitas merupakan salah satu instrumen penting dalam memperlancar arus lalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan.

**Tabel 2. 16**  
**Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No.	Elemen Data	Data Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Ijin Trayek	207	212	217	228	228	Unit
	Izin Trayek antarkota antarprovinsi	55	60	60	65	65	Unit
	Izin Trayek antarkota dalam provinsi	119	119	124	130	130	Unit
	Izin Trayek perkotaan	18	18	18	18	18	Unit
	Izin Trayek perdesaan	15	15	15	15	15	Unit

No.	Elemen Data	Data Tahun					Satuan
		2013	2014	2015	2016	2017	
2.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	145.670	145.701	145.701	152.564	152.788	Unit
	Mobil penumpang umum	7.834	7.865	7.865	7.865	7.865	Unit
	Mobil bus	569	569	569	569	569	Unit
	Mobil barang	137.267	137.267	137.267	144.13	144.354	Unit
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum	1.5	1.425	1.425	1.355	1.426	Unit
4.	Jumlah Angkutan Umum yang Tidak Memiliki KIR	0	0	0	0	0	Unit
5.	Lama Pengujian KIR	3	3	3	3	3	Hari
6.	Biaya Pengujian KIR	75	75	75	75	75	Rupiah

Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

Akses pelayanan transportasi sungai pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut jumlah kendaraan roda empat yang terangkut kapal ferry meningkat 42,3%. Selain itu, jumlah orang melalui angkutan penyeberangan sungai juga mengalami peningkatan lebih dari 17% setiap tahunnya. Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kapal ferry yang beroperasi, mencapai lebih dari 140% pada periode yang sama.

**Tabel 2. 17**  
**Penyelenggaraan Layanan Transportasi Sungai**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Transportasi Sungai	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
- Kapal Ferry	7	8	10	14	17	Unit
- Kendaraan Roda Empat	238.419	258.031	385.009	453.116	563.040	Unit/Tahun
- Jumlah Orang Melalui Dermaga	64.39	77.302	82.673	90.578	122.034	Orang/Tahun

Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

Ketersediaan prasarana perhubungan laut sudah cukup baik. Meskipun jumlah pelabuhan laut mengalami stagnasi pada periode 2013-2017, namun upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pembangunan 4 pelabuhan laut baru yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019/2020 yaitu Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Mantaritip. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

**Tabel 2. 18**  
**Penyelenggaraan Layanan Transportasi Laut**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

N o	Transportasi Laut	2013	2014	2015	2016	2017	Sat uan
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	9	9	9	9	9	Unt
2.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Tiba	687.407	456.539	209.854	223.305	256.425	org
3.	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Berangkat	613.991	375.124	193.981	229.755	249.352	org
4.	Jumlah Barang yang dibongkar	241.782.957	74.390.526	368.562.664	305.323.205	354.236.245	ton
5.	Jumlah Barang yang dimuat	1.475.126.290	751.434.882	2.261.812.201	2.127.509.901	1.968.235.146	ton

*Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018*

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang terletak di Kota Balikpapan. Bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Penyelenggaraan layanan tersebut dioperasionisasikan oleh 7 maskapai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di tiga kecamatan yaitu Datah Dawai, Long Apung dan Long Bawan. Meskipun akhirnya dua kecamatan yang disebutkan terakhir menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, rencana pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di



Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu telah diselesaikan. Studi kelayakan dan lingkungan untuk pembangunan bandara perintis tersebut telah dilakukan yang kemudian implementasinya akan diteruskan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

#### **g. Komunikasi dan Informatika**

Masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi informasi secara optimal. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai akses komunikasi dan informatika agar memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

**Tabel 2. 19**  
**Jumlah Sarana Komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016**

<b>Sarana Komunikasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Kantor Pos	73	Kantor
Menara Telekomunikasi	3	Unit
Stasiun Radio	178	Stasiun
Website Daerah	73	Unit
Jumlah Sarana Telekomunikasi	268	TV/Radio

*Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017*

Data ini mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dan informatika masih belum memadai di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dasar komunikasi dan informasi yang banyak belum tersedia hingga wilayah pedalaman sehingga membuat penduduk belum dapat mengakses layanan tersebut dan sistem informasi yang belum berjalan lancar.

#### **h. Penanaman Modal**

Investasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jika dilihat dari realisasinya yang terus meningkat. Hal yang menjadi perhatian adalah sektor yang memiliki daya pikat para investor baik dalam negeri dan luar negeri.

**Tabel 2. 20**  
**Realisasi PMDN dan PMA Per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

No	Sektor Usaha	PMDN (Rupiah)			PMA (\$ US)		
		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja
<b>I</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>153</b>	<b>7.626.529.600.000</b>	<b>7.817</b>	<b>247</b>	<b>1.069.344.700</b>	<b>13.298</b>
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	90	2.886.876.900.000	6.278	104	159.353.800	4.405
2	Peternakan	1	-	-	7	1.214.000	18
3	Kehutanan	6	25.144.200.000	442	9	8.273.400	1.503
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-
5	Pertambangan	56	4.714.508.500.000	1.097	127	900.503.500	7.372
<b>II</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>94</b>	<b>906.355.300.000</b>	<b>876</b>	<b>144</b>	<b>111.444.700</b>	<b>1.411</b>
1	Industri Makanan	42	551.959.100.000	601	83	72.145.900	1.012
2	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	11	316.482.000.000	34	4	-	-
5	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	-	-	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	19	9.351.900.000	112	15	9.552.500	91
7	Industri Karet & Plastik	2	-	-	8	9.494.000	99
8	Industri Mineral Non Logam	6	748.300.000	-	15	16.586.100	120
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik	2	27.566.000.000	-	7	3.607.700	78
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-
11	Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	5	-	111	9	58.500	11
12	Industri Lainnya	7	248.000.000	18	3	-	-
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>110</b>	<b>2.447.331.500.000</b>	<b>543</b>	<b>175</b>	<b>104.425.800</b>	<b>799</b>
1	Listrik, Gas dan Air	27	2.297.726.200.000	248	36	21.413.400	214
2	Konstruksi	5	375.300.000	-	6	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	37	136.787.700.000	175	53	13.289.100	261
4	Hotel & Restoran	10	530.000.000	8	23	704.800	26
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	14	4.322.200.000	9	19	67.399.200	253
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	9	2.850.000.000	5	26	1.115.400	4
7	Jasa Lainnya	8	4.740.100.000	98	12	503.900	41
<b>Total</b>		<b>357</b>	<b>10.980.216.400.000</b>	<b>9.236</b>	<b>566</b>	<b>\$ 1.285.215.200</b>	<b>15.508</b>

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Nilai investasi sektor sekunder dan tersier baik PMDN ataupun PMA belum optimal. Sektor primer merupakan kontributor terbesar. Besaran proporsi nilai investasi sektor sekunder terhadap total nilai investasi sebesar 8,25% untuk PMDN dan 8,67% untuk PMA. Sub-sektor industri makanan yang berperan banyak dalam menyumbang nilai investasi di sektor sekunder. Proporsi nilai investasi tersier hanya menyumbang 22,29% untuk PMDN dan 8,13 % untuk PMA. Sektor listrik, gas, dan air menyumbang nilai PMDN terbesar sedangkan transportasi, gudang, dan komunikasi untuk PMA. Belum optimalnya nilai investasi kedua sektor tersebut dikarenakan masalah promosi investasi pada sektor sekunder dan tersier belum optimal dan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil. Penyebab tersebut dipengaruhi oleh beberapa penyebab indikator dibawahnya. Promosi yang kurang dipengaruhi oleh masih kurangnya ketersediaan informasi detail peluang investasi.

Selain permasalahan nilai investasi yang sudah berjalan, pemanfaatan potensi kawasan strategis ekonomi belum memberikan kontribusi yang signifikan. Belum optimalnya kontribusi kawasan strategis disebabkan oleh beberapa penyebab indikator. Konflik kepemilikan dan pengusaan lahan di beberapa kawasan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung. Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi juga belum dilakukan secara optimal. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : (1) Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih kurang; (2) Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor; (3) Komitmen pemerintah pusat terkait kelanjutan pendanaan; (4) Evaluasi ijin yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan; dan (5) Rendahnya akses infrastruktur menuju pusat industri.

### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**

Urusan pilihan menjadi sektor pengungkit yang sangat potensial dan menjadi *leading* sektor di beberapa daerah. Berikut adalah beberapa sektor yang masuk kedalam urusan pemerintahan pilihan Provinsi Kalimantan Timur:

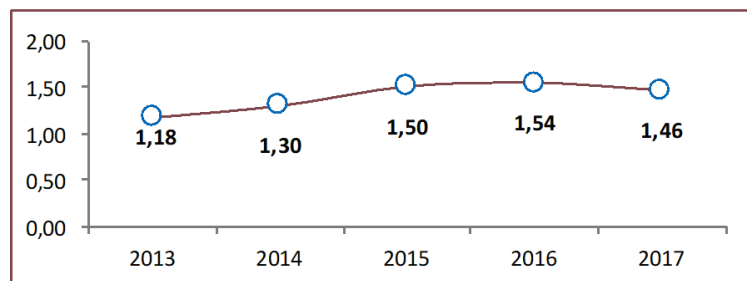
### **a. Kelautan Dan Perikanan**

Peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB berdampak pada peningkatan nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor perikanan. Berikut adalah data yang memuat capaian kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dan produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Timur:

#### **1) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB**

Kontribusi sub sektor perikanan tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan tren kenaikan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,46%. Beberapa penyebab masalah indikatif yang sering dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani, pembudidaya ikan atau nelayan dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki untuk menangkap serta mengembangbiakan ikan.

**Grafik 2. 17**  
**Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017*

#### **2) Produksi Perikanan**

Berdasarkan sub-sektor perikanan, produksi dibagi menjadi produksi perikanan laut, darat, umum, tambak, kolam, keramba, sawah dan budidaya pantai/laut. Pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah produksi perikanan. Penurunan terbesar terjadi pada sub-sektor budidaya pantai/laut sebesar 84,5% dan perairan umum, tambak dan kolam, masing-masing sebesar 10,2%. Pada tahun 2013 hingga 2013 peningkatan terbesar pada sub-sektor perikanan sawah dan keramba. Periode selanjutnya, yaitu tahun 2014-2015 kenaikan terbesar terjadi pada sub-sektor budidaya pantai yang selanjutnya disusul oleh

peningkatan sebesar 45,6% pada sub-sektor perikanan tambak pada tahun 2015 hingga 2016.

**Tabel 2. 21**  
**Produksi Perikanan (ton) Menurut Sub Sektor Perikanan**  
**di Provinsi Kalimantan Timur**

Jenis Sub-Sektor Perikanan	2012	2013	2014	2015	2016
Perikanan Laut	105.392,30	94.679,00	96.850,50	104.622,30	104.622,30
Perikanan Darat					
Perairan umum	105.392,30	94.679,00	96.850,50	40.557,90	41.462,30
Tambak	105.392,30	94.679,00	96.850,50	38.165,50	55.578,90
Kolam	105.392,30	94.679,00	96.850,50	2.694,20	2.859,90
Keramba	696.940,80	667.316,40	712.355,60	802.292,40	35 503,10
Sawah	555,30	203,10	14.463,20	6.441,60	1,50
Budidaya Pantai/ Laut	164.378,70	25.487,00	23.394,60	73.703,10	5 521,60

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, 2016

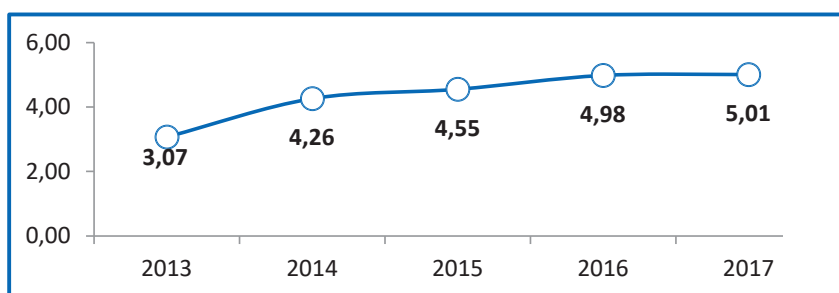
### **b. Pertanian**

Pertanian tidak hanya terkait peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, namun juga terkait kesejahteraan petani yang dinilai dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub-sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

#### **1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Kinerja sektor pertanian dapat dinilai menggunakan indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi pertanian, maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanian dapat dibagi menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan sayur-sayuran.

**Grafik 2. 19**  
**Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB (%) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengalami kenaikan mulai tahun 2013 hingga 2017. Sub sektor perkebunan menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB sehingga kontribusi sektor pertanian meningkat setiap tahunnya.

## 2) Produksi Padi

Salah satu komoditas utama tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi. Saat ini, produksi beras dari dalam (lokal) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah. Oleh karena itu, swasembada pangan dalam hal ini beras belum terwujud.

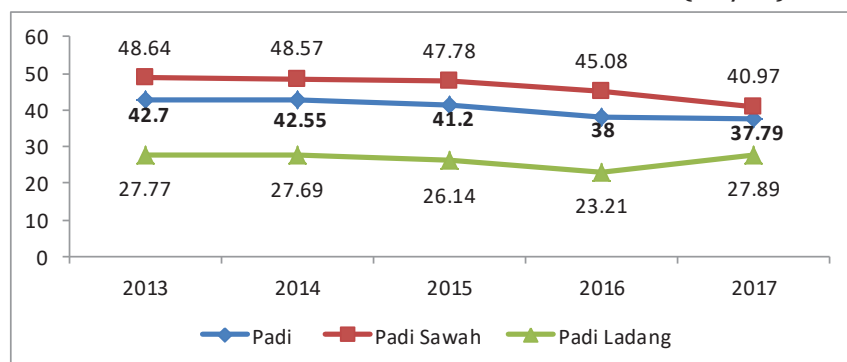
**Tabel 2. 22**  
**Rasio Pemenuhan Beras Lokal Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (%)**

Tahun	2015	2016	2017
Rasio Pemenuhan Beras Lokal	66,87	48,07	61,54

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Besaran rasio pemenuhan beras lokal kurang dari 100% menunjukkan produksi beras dalam daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pangan daerah. Guna memenuhi kebutuhan konsumsi beras, diperlukan pasokan beras dari luar daerah seperti Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Swasembada beras belum terjadi disebabkan karena masih rendahnya produksi padi dalam daerah.

**Grafik 2. 20**  
**Perkembangan Tingkat Produktivitas Padi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)**



Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id)

Selama tahun 2013-2017 menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi. Hal ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang tinggi di

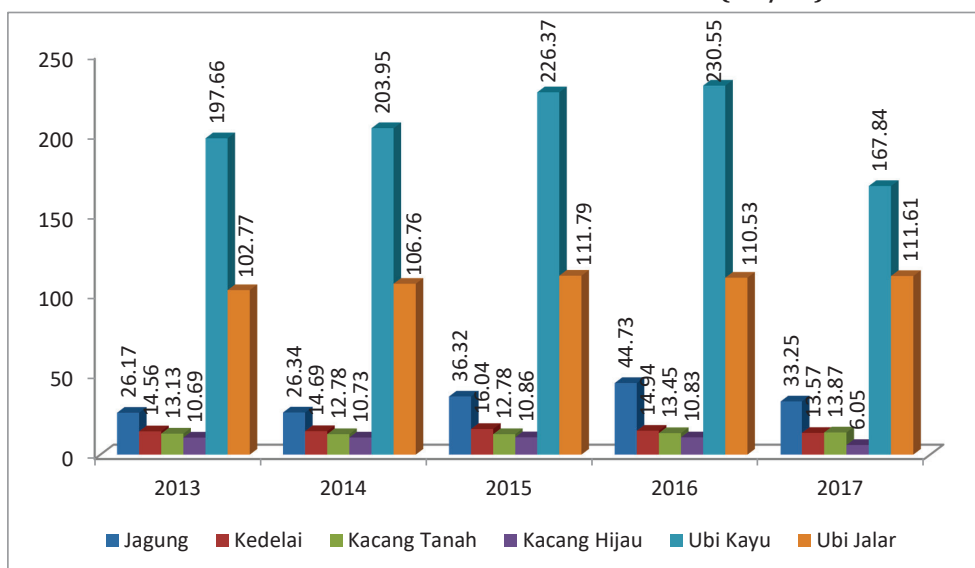
wilayah perkotaan yang berdampak pada menurunnya luas tanam padi dan rendahnya kualitas pengelolaan padi pada masa tanam. Adapun jika dilihat dari daerahnya, penyumbang produksi padi terbesar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan terendah terdapat pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang sudah tidak mengandalkan perekonomiannya pada sektor agraris. Pada umumnya berbagai kota di Kalimantan Timur sudah mulai beralih pada sektor perdagangan dan jasa yang memerlukan pembangunan berbagai pusat perdagangan, sehingga lahan sawah menjadi terbatas.

Konsumsi beras di Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi walaupun rendah jika dibandingkan nasional sebesar 150 kg/kap/th. Meskipun demikian pasokan produksi beras lokal hanya dikisaran 60%, dan 40% lainnya didatangkan dari luar. Penyebab indikatif diversifikasi pangan belum optimal adalah karena teknologi diversifikasi pangan (beras) yang digunakan masih belum optimal dan pelaksanaan promosi pangan non beras belum optimal.

### **3) Palawija**

Produksi palawija terbesar disumbang oleh komoditas ubi kayu dan ubi jalar, sedangkan produksi palawija yang terendah terdapat pada kacang hijau. Besarnya produksi ubi kayu berpotensi memberi peningkatan ketahanan pangan dalam daerah, jika dioptimalkan dengan baik. Pengembangan produksi ubi kayu juga harus diikuti oleh penguatan kapasitas petani, salah satunya adalah perbaikan metode budidaya untuk menjangkau pangsa pasar regional.

**Grafik 2. 21**  
**Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)**



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*

#### 4) Perkebunan

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja sub-sektor perkebunan adalah produktivitas hasil perkebunan. Saat ini, produktivitas perkebunan rakyat termasuk dalam kategori rendah. Definisi dari perkebunan rakyat adalah bukan perkebunan plasma dan perkebunan kemitraan melainkan perkebunan tanam mandiri.

**Tabel 2. 23**  
**Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ton/Ha)**

Jenis Tanaman Perkebunan	2017
Sawit	16,6
Karet	1,275
Kakao	0,501
Kelapa Dalam	0,82
Lada	0,985

*Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2017*



Produktivitas komoditi perkebunan belum optimal karena beberapa penyebab indikatif, seperti masih banyak komoditi tanaman rusak yang tidak digunakan kembali. Pada tahun 2017 luas lahan komoditi tanaman rusak mencapai 28.260 Ha untuk sawit; 3.659 Ha untuk karet; 996 Ha untuk Kakao; 2.954 Ha untuk kelapa dalam; dan 666 Ha untuk lada. Selain itu banyak lahan yang belum menghasilkan komoditi.

Penyebab produktivitas perkebunan rakyat masih rendah lainnya adalah ketersediaan benih unggul masih kurang. Pada Tahun 2016, UPTD PBP mensertifikasi terdiri 1,67 juta bibit dan 1,39 juta kecambah kelapa sawit, kakao 108 ribu bibit, aren 58 ribu kecambah dan 9.000 bibit, lada 161 ribu bibit lada serta 47 ribu stek. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 19 pengedar benih resmi selainnya benih didatangkan dari luar. Guna memenuhi ketersediaan benih unggul tahun 2018 melalui APBN akan dibangun kebun induk lada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Berau masing-masing luas satu hektar.

Terdapat permasalahan lain pada sektor perkebunan, yaitu belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit). Hal ini menambah biaya produksi. Kondisi ini terjadi karena perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit belum memadai.

## 5) Produksi Hasil Ternak

Semakin tinggi produksi daging maka semakin besar PDRB sektor pertanian dan potensi inflasi di sektor pangan dapat ditekan.

**Tabel 2. 24**  
**Produksi Daging Ternak (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi Potong	8.737,95	8.606,64	8.811,72	9.129,40	8.043,36	8.241,26
Kerbau	262,31	50,06	63,98	36,98	45,23	58,17
Kambing	569,08	507,09	563,68	441,36	504,23	584,79
Domba	5,04	4,18	2,29	1,42	1,14	0,96
Babi	1.271,94	1.281,05	1.449,35	1.009,38	934,38	831,31

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Sejalan dengan populasi sapi yang besar di Kalimantan Timur, produksi daging sapi potong menjadi yang terbanyak. Walaupun produksi daging tersebut mengalami tren yang fluktuatif. Produksi daging babi menjadi komoditas nomor dua setelah sapi. Daging domba menjadi komoditas produksi paling kecil. Hal ini terjadi karena beberapa sebab indikatif, seperti rendahnya populasi domba di Kalimantan Timur.

Selain produksi daging, produksi telur dan susu juga menjadi indikator yang harus diperhatikan. Produksi telur terbanyak terdapat di ayam petelur. Pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 19,9%. Peningkatan laju produksi tertinggi terdapat pada tahun 2014-2015, setelah terjadi penurunan produksi telur yang sangat signifikan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Ayam kampung dan itik menjadi unggas yang menyumbang produksi telur kedua dan ketiga. Produksi telur masih berpotensi untuk ditingkatkan. Perbaikan metode budidaya diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi telur tersebut.

**Tabel 2. 25**  
**Produksi Telur dan Susu (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

<b>Jenis Produksi Ternak</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ayam petelur	9.992,80	11.984,00	5.291,20	7.541,20	6.493,20	6.341,72
Ayam kampung	3.253,00	3.253,00	2.745,90	2.921,60	3.054,20	3.470,28
Itik	866,80	824,40	1.195,60	1.191,30	1.056,90	1.203,12
Susu	-	73,44	117,81	125,46	148.410	163.710

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

Ayam pedaging menjadi penyumbang terbesar bagi produksi daging unggas di Kalimantan Timur. Produksi tertinggi berada pada tahun 2017, sedangkan yang terendah berada pada tahun 2012. Komoditas kedua yang menyumbang produksi daging unggas terbesar adalah ayam kampung dan ayam petelur. Produksi daging ayam kampung terbesar berada pada tahun 2017, sedangkan ayam petelur berada pada tahun yang sama (2013). Metode budidaya dan jenis bibit ternak unggas menjadi faktor indikatif yang berpengaruh terhadap produksi daging unggas di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. 26**  
**Produksi Daging Unggas (ton) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

Jenis Ternak	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ayam Kampung	5.222,60	5.637,60	4.758,70	5.042,60	5.271,60	5.989,69
Ayam Petelur	583,20	699,50	308,80	435,90	379,80	n/a
Ayam Pedaging	34.437,50	41.799,40	43.644,20	53.859,80	56.531,60	61.669,1
Itik/ Itik Manila	65,90	62,70	95,10	95,50	79,50	114,12

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

**c. Kehutanan**

Pada tahun 2013 hingga 2017 PDRB sektor kehutanan masih menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif. PDRB sektor kehutanan mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2016. Kontribusi PDRB terbesar terdapat pada tahun 2017. Pada tahun 2013-2014 terjadi peningkatan kontribusi PDRB sebesar 0,05%. Peningkatan kontribusi sektor kehutanan tersebut juga terjadi pada periode 2014-2015 dan 2015-2016, yaitu masing-masing sebesar 0,17% dan 0,01%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 0,19%. Peningkatan kontribusi ini masih mungkin untuk dijalankan, namun tetap berpijak pada aspek pembangunan yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan sektor lain, kontribusi sektor kehutanan relatif lebih rendah.

**d. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang cukup besar di bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, penggambaran kinerja bidang urusan ESDM akan merefleksikan beberapa ukuran yang variatif. Beberapa bidang yang menjadi acuan meliputi dalam RPJMD periode ini adalah bidang ketenagalistrikan, pertambangan dan sumber daya mineral.

## 1) Ketenagalistrikan

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Hasil suvey lapangan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan bahwa akses ketenagalistrikan belum memadai. Pada tahun 2015, sebagian besar masyarakat mengakses listrik non-PLN, mencapai 64% dari total keluarga. Hanya 12,16% keluarga yang telah mengakses listrik PLN dan 13,84% belum memiliki akses listrik. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,07%. Capaian tersebut belum optimal mengingat capaian nasional mencapai 92,75% pada tahun yang sama.

**Tabel 2. 27**  
**Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik**  
**di Provinsi Kalimantan Timur**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio elektrifikasi	75,06	75,9	76,59	79,67	84,07
Rasio desa berlistrik	90,22	93,9	96,6	96,82	97,01

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018*

Kualitas instalasi listrik non-PLN yang terpasang belum optimal karena belum sesuai dengan standar kenyamanan. Rata-rata listrik non-PLN hanya beroperasi selama 6 jam setiap harinya. Daya listrik non-PLN yang dialirkan berasal dari PLTS, PLTD, PLTU dan PLTG. Hal tersebut berarti cakupan layanan ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut disebabkan oleh penyediaan listrik di wilayah 3T belum maksimal dan belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

## 2) Pertambangan

Berikut adalah kondisi sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur:

**Tabel 2. 28**  
**Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertambangan						
1. Bahan Tambang						
A. Total Produksi Minyak Bumi	39.001.739	35.205.350	36.605.800	34.323.800	29.754.180	Barel
B. Total Produksi Gas Alam	711.516.656	605.579.007	609.744.520	568.588.800	449.579.200	MMBTU
C. Batubara						
1. Produksi	256.910.421,87	253.227.752,56	236.613.732,47	218.196.784,74	247.302.813,65	Ton
a. PKP2B	172.437.475,66	171.972.467,95	162.078.297,31	145.095.068,28	161.961.153,28	Ton
b. KP/IUP	82.936.745,16	81.215.397,09	75.000.990,56	72.052.946,99	86.101.658,68	Ton
2. Jumlah Perusahaan	1.223	1.223	1.107	1.172	1.417	Izin
2. Industri						
1. Total Produksi LNG	23.904.326	22.244.537	n/a	n/a	n/a	M3
2. Total Produksi Propane	419.744	368.23	n/a	n/a	n/a	M3
3. Total Produksi Butane	393.264	364.29	n/a	n/a	n/a	M3
3. Reklamasi Lahan Tambang						
1. Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	39,29	42,90	45,03	40,85	47,19	%
4. Reklamasi Batu Bara	43.097,97	47.057,85	49.394,29	44.809,17	98.702,47	Ha
5. Pertambangan Tanpa Izin						
1). Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	0	0	0	0	30,20	Ha
2). Luas area penambangan yang liar	0	0	0	0	37,97	Ha

Sumber: [sidata.kaltimprov.go.id](http://sidata.kaltimprov.go.id), 2018

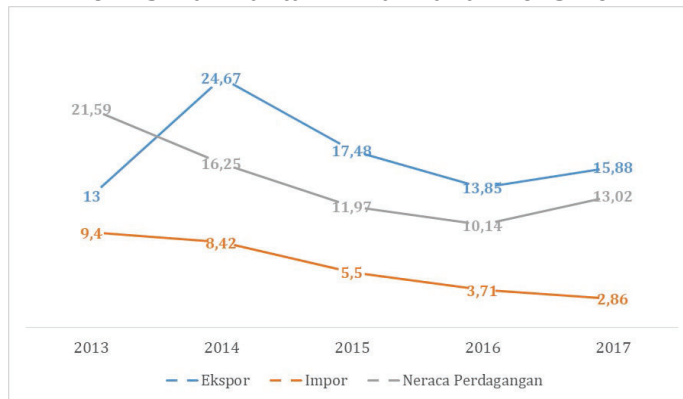
Geliat industri ekstraktif di Provinsi Kalimantan Timur mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat terindikasi dari penurunan tingkat produksi beberapa sektor pertambangan. Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama pertambangan mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga pasar dunia beberapa produk

pertambangan sehingga berakibat pada lesunya aktivitas pertambangan di daerah.

**e. Perdagangan**

Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan. Kenaikan nilai surplus perdagangan dikarenakan adanya peningkatan pada nilai ekspor dan penurunan nilai impor.

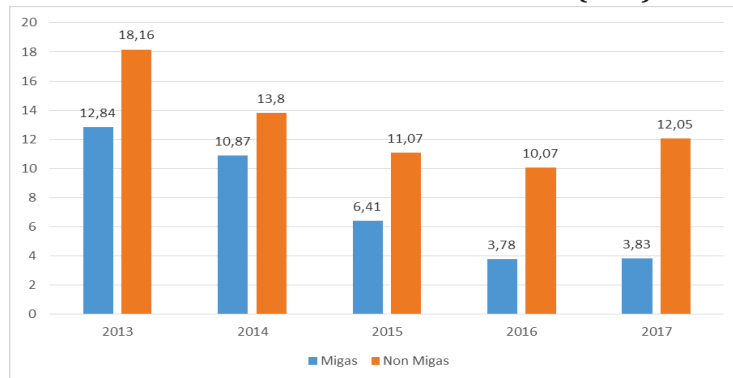
**Grafik 2. 22**  
**Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017; BPS, 2017*

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar 1.98 persen. Peningkatan nilai ekspor ini disebabkan karena terjadi peningkatan nilai ekspor migas maupun non migas. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari golongan produk mineral.

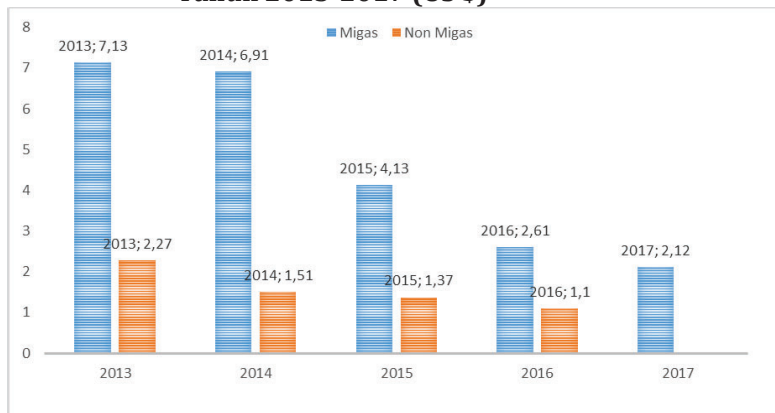
**Grafik 2. 23**  
**Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Provinsi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (US \$)**



*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu lebih besar dari non migas.

**Grafik 2. 24**  
**Nilai Impor Migas dan Non Migas Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (US \$)**



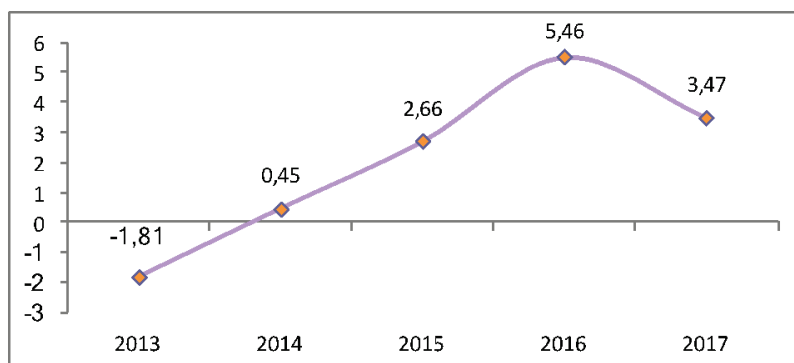
*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

#### **f. Perindustrian**

Pertumbuhan sektor perindustrian menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata pertumbuhan sektor tersebut selama tahun 2013-2017 adalah 2,85

persen. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan masih dapat dikembangkan. Meskipun demikian, masih ada persoalan pada sector ini yaitu terkait dengan kontribusinya terhadap PDRB yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

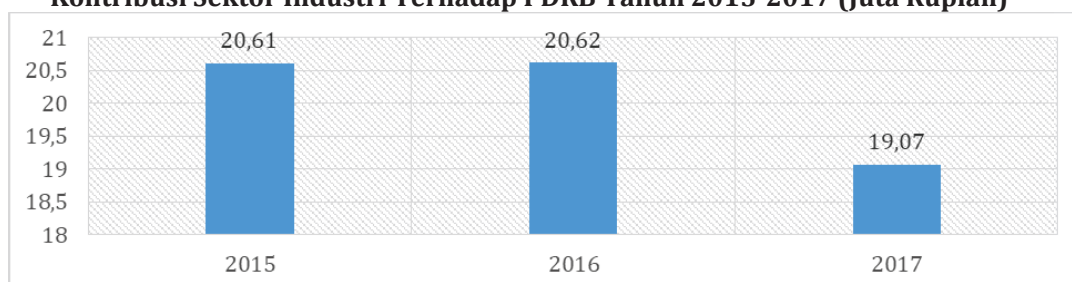
**Grafik 2. 26**  
**Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**  
**Berdasarkan Harga Konstan (Seri 2010) Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**



*Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka 2017*

Kurun waktu 3 (tiga) tahun (2015-2017), kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Penurunan tersebut sebesar 1.55 persen dari sebelumnya sebesar 20.62 persen menjadi 19.07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan menengah.

**Grafik 2. 27**  
**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)**



*Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id>*



Jumlah IKM yang berorientasi ekspor mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jumlah IKM yang berorientasi ekspor terbanyak terdapat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 20 unit, kemudian menurun secara drastis. Tinggal 1 unit IKM yang berorientasi ekspor pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yaitu menjadi 15 unit. Meskipun demikian jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Sementara volume usaha Kawasan industri mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung stagnan bahkan tidak dijalankan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan kecil dan menengah belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu lambatnya pertumbuhan investasi IKM, belum terkoneksiya lulusan SMA/SMK dengan industri, dan integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum optimal. Guna meningkatkan kontribusi sektor industri terutama industri menengah dan kecil maka ada beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Berikut ini beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan.

**Tabel 2. 29**  
**Jumlah IKM yang Berorientasi Industri dan Volume Usaha Kawasan Industri**  
**Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Unit)**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	3	7	20	1	15
Volume Usaha Kawasan Industri	1.60	127.97	93.00	93.00	Tidak dijalankan

Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/365>; Laporan Evaluasi Tahun V RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Berbagai komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu komoditas unggulan dan komoditas. Komoditas unggulan yang mendominasi di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit. Selanjutnya komoditas fokus adalah komoditas yang dijadikan sebagai kandidat pengembangan berdasarkan penilaian yang dilakukan pada sub-kriteria dengan mempertimbangkan aspek keunggulan. Perbandingan tingkat kepentingan, penggabungan nilai keunggulan dan perbandingan berpasangan. Lima

komoditas utama yang dapat dikembangkan secara prospektif dan pontensial, yaitu Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.

**Tabel 2. 30**  
**Komoditas Produk Unggulan Industri Menengah Besar**  
**Kalimantan Timur**

No.	Komoditas	Lokasi
1.	Kayu Lapis ( plywood ), Mdf	Samarinda, Balikpapan, PPU, Kukar
2.	Udang Beku	Balikpapan, Kukar
3.	Ind. Pengolahan kayu/sawmill	Samarinda, Balikpapan, Kukar, Berau, Paser, Kutim
4.	Crude Palm Oil	Kutai, Paser, Kutim
5.	Galangan Kapal	Kukar, Paser, Samarinda, Balikpapan
6.	Pupuk urea & Amoniak	Bontang
7.	Moulding	Samarinda, Balikpapan, Kukar
8.	Methanol	Bontang
9.	Hexamethylene Tetramine	Bontang
10.	Melamine	Bontang
11.	Ind. Lem	Samarinda, Bontang
12.	Ind. Minyak Kelapa	Penajam Paser Utara
13.	Pulp	Berau
14.	Bengkel Service	Samarinda, Balikpapan, Kubar, Kukar
15.	Ind. Pengolahan Rotan	Paser, Balikpapan
16.	Kulit Buaya	Balikpapan
17.	Kain Tenun Ulap Doyo	Kutai Kartanegara
18.	Garmen	Balikpapan

*Sumber: Dinas Indakop Provinsi Kalimantan Timur, 2018.*

### **2.3.3 Fokus Urusan Penunjang**

#### **2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan**

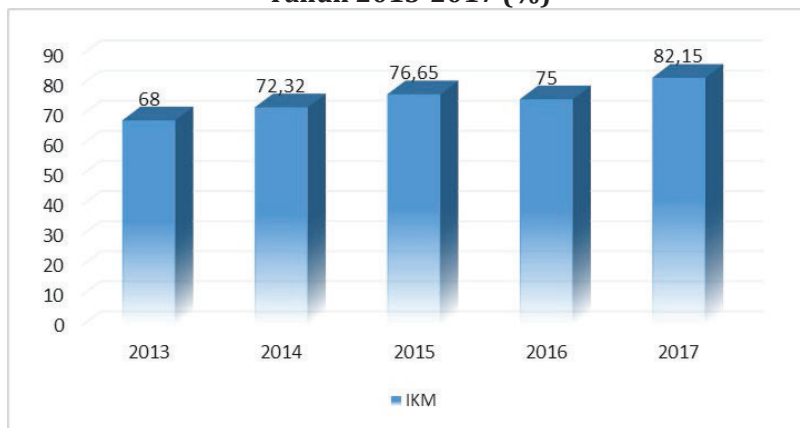
Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat melalui prestasi daerah dalam Anugerah Pangripta Nusantara (APN). APN merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan. Pemberian APN dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat terbaik kedua dalam APN untuk kategori provinsi. Akan tetapi, pada tahun 2016 dan 2017, Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi menduduki peringkat kedua terbaik dalam APN, di mana hanya masuk dalam nominasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan mengalami penurunan. Hasil diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa persoalan ini

disebabkan oleh adanya indikator perencanaan perangkat daerah yang belum konsisten terutama di tingkat kegiatan dan sub kegiatan.

### 2.3.3.2 Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Capaian IKM Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:

**Grafik 2. 28**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017 (%)**



Sumber: RKPD 2016; Kinerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018.

IKM Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2013 hingga 2017 mengalami perkembangan yang cukup baik. Meskipun sempat terjadi penurunan angka IKM pada tahun 2016, IKM Provinsi Kalimantan Timur kembali meningkat pada tahun 2017. Artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Meskipun demikian, masih ada persoalan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan kontrol terhadap kegiatan survei IKM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Saat ini, kontrol terhadap survei IKM belum berjalan optimal. Persoalan ini diindikasikan dengan masih adanya hasil survei yang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada OPD pengampu yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Selain itu, persoalan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan belum berjalannya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 (Sembilan) SPM, sementara di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 15 (lima belas) SPM. Namun, total SPM tersebut belum dijalankan secara optimal atau dengan kata lain SPM tersebut belum terealisasi. Persoalan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait SPM secara jelas dan menyeluruh. Disamping itu, komitmen aparatur daerah dalam menjalankannya juga masih rendah. Namun, terkait dengan peraturan, saat ini telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum yang mengatur secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan pelaksanaan SPM. Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan lebih mudah untuk menerapkan SPM di masing-masing daerah kabupaten/kota maupun internal instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### 2.3.3.3 Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 31**  
**Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun 2014-2017**

No	Tahun	Indeks	Kategori
1	2014	4,81	Sangat Tinggi
2	2015	3,66	Sangat Tinggi
3	2016	3,44	Sangat Tinggi
4	2017	1,63	Tinggi

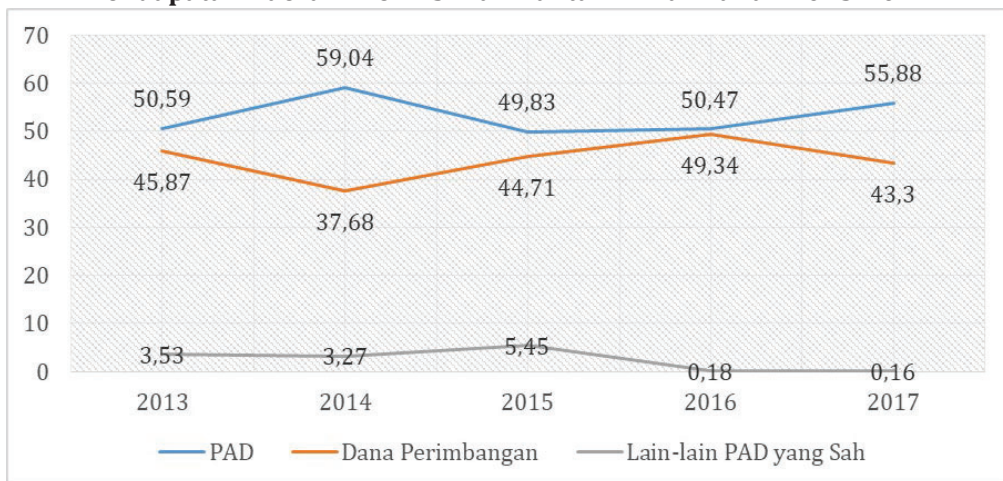
*Sumber: PMK 2014-2017*

Indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan. Penurunan indeks yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Kondisi ini terjadi karena adanya metode perubahan perhitungan dalam penentuan indeks kapasitas fiskal. Selain itu, penurunan ini juga disebabkan oleh adanya fluakuasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena sebagian besar

berasal dari sumber daya alam seperti batubara di mana harganya mengikuti mekanisme pasar.

Dilihat dari sisi kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lain. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2. 29**  
**Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: RKPD 2018*

Dari tahun 2013 hingga 2017, PAD memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2015, dari 59,04% menjadi 49,83% pada tahun 2015. Berbeda halnya pada tahun 2016 dan 2017 yang mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 50,47 persen dan 55,88 persen. Kontribusi sumber pendapatan daerah setelah PAD adalah dana perimbangan. Rata-rata kontribusi dana perimbangan dari tahun 2013 hingga 2017 mencapai 44,40%. Sementara sumber pendapatan daerah yang kontribusinya paling rendah adalah lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2015 sebesar 5,45 persen menjadi 0,18 persen pada tahun 2016 dan menurun lagi menjadi 0,16 persen pada tahun 2017. Dilihat dari sisi kemandirian daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik karena PAD memiliki kontribusi yang sangat tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar

sumber-sumber PAD berasal dari sumber daya alamnya. Di satu sisi hal ini sebagai bentuk pemanfaatan potensi daerah, namun di sisi lain sumber pendapatan yang berasal SDA akan mengalami penurunan karena SDA semakin banyak digunakan akan semakin menurun. Dalam konteks ini, perlu adanya transformasi sumber-sumber PAD dari SDA ke non SDA secara bertahap, yaitu berupa upaya-upaya untuk menggali sumber pendapatan melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan perlu dilakukan agar ketergantungan daerah pada hasil pajak pemanfaatan sumber daya alam dapat dikurangi dan digantikan/ditambah dengan hasil pajak investasi dan nilai tambah industri berbasis sumberdaya alam terbarukan seperti bidang pariwisata serta potensi ekonomi lainnya.

#### 2.3.3.4 Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah. Perkembangan opini BPK di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2. 32**  
**Opini BPK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peringkat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017; Laporan Kinerja Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018*

Laporan keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi, kondisi tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2015 hingga 2017 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Status tersebut harus dipertahankan karena menjadi salah satu cerminan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, perlu adanya perhatian terhadap manajemen keuangan terutama terkait dengan kapasitas PAD dan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang akibat diterbitkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK yang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 33**  
**Persentase Perkembangan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini WTP**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	29	60	80	80	80

*Sumber: sidata.kaltimprov.go.id*

Tabel di atas menunjukkan perkembangan opini BPK tingkat Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan cenderung stagnan selama tiga tahun (2015-2017). Hal ini disebabkan karena dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini WDP, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini menunjukkan bahwa opini BPK di tingkat Kabupaten/Kota belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga dapat dijadikan sebagai salah satu cerminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah.

**Tabel 2. 34**  
**Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan Timur se-Indonesia Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	2011	9	2,5085	Tinggi
2	2012	7	2,5914	Tinggi
3	2013	7	2,6718	Tinggi
4	2014	4	2,9055	Tinggi
5	2015	3	3,1469	Sangat Tinggi

*Sumber: Keputusan Menteri dalam Negeri No.120-10421 Tahun 2016, Nomor 800-35 Tahun 2016, No. 120-4761 Tahun 2014, No.120-251 Tahun 2014, No. 120-2818 Tahun 2013*

Peringkat atau nomor EKPPD Provinsi Kalimantan selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada

tahun 2015 status skor EKPPD Provinsi Kalimantan Timur adalah sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Namun, pada tahun 2016 peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat ke tiga menjadi peringkat ke tujuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah belum optimal baik dari sisi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.

Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

**Tabel 2. 35**  
**Peringkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Nilai	
		Skor	Predikat
1	2013	70,75	B plus
2	2014	70,97	B plus
3	2015	75,14	BB
4	2016	77,37	BB
5	2017	77,49	BB

*Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018*

Capaian skor dan predikat AKIP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 dan 2014, predikat AKIP mencapai B plus. Predikat tersebut meningkat menjadi BB pada tahun 2015 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Meskipun demikian, ada 2 (dua) hal yang perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan terutama di kegiatan dan sub kegiatan dan meningkatkan integrasi perangkat daerah dalam sistem akuntabilitas kinerja yang belum optimal. Dengan memperbaiki kedua hal tersebut, diharapkan kedepan SAKIP Provinsi Kalimantan Timur meningkat.

#### **2.3.3.5 Keterbukaan informasi publik**

Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip *governance*. Salah satu indikator untuk mengukur



transparansi daerah adalah keterbukaan informasi publik. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 36**  
**Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur**  
**Se-Indonesia Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Peringkat	Nilai
1	2013	5	62,88
2	2014	3	91
3	2015	3	81,18
4	2016	3	88,17
5	2017	8	-

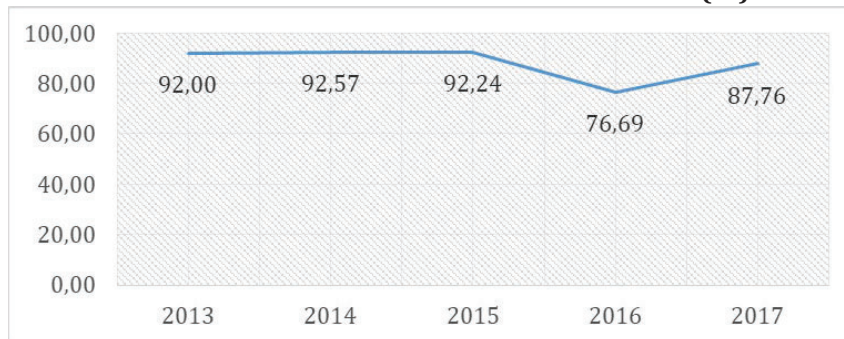
*Sumber: Laporan Tahunan KIP 2012-2016*

Data di atas menunjukkan bahwa indeks keterbukaan informasi publik mengalami penurunan peringkat dari peringkat ke 3 menjadi peringkat ke 8 nasional. Permasalahan tersebut terjadi karena belum optimalnya kelembagaan informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP). Persoalan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu tindak lanjut sengketa informasi belum optimal, pengembangan PPID belum optimal, dan penyusunan dokumen terkait keterbukaan informasi belum optimal. Sementara akses terhadap informasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan baik yang diindikasikan dengan mudahnya mendapatkan data atau informasi capaian pembangunan daerah di website pemerintah seperti sidata.com, BPS, dan sebagainya.

#### *2.3.3.6 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan*

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM aparatur. Adapun data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 2. 30**  
**Persentase Pembinaan PNS dan Peningkatan Kualitas SDM**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)**



*Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018*

Persentase pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 sudah cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 90%. Akan tetapi, pada tahun 2016 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 76,69. Namun pada tahun 2017, terjadi peningkatan menjadi 87,76 persen. Meskipun demikian, pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur daerah masih meninggalkan persoalan karena capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 hingga 2015. Kondisi ini penting untuk ditingkatkan karena pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah sangat berperan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ASN. Berikut ini persentase ASN yang mengikuti diklat.

**Tabel 2. 37**  
**Persentase ASN yang Mengikuti Diklat**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.9	1.7	1.5	1.8	0.6	0.3
2	Persentasi pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	99	80	40	70	33	19

*Sumber: BPSDM 2013-2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan ASN yang mengikuti Diklat baik formal maupun struktural mengalami penurunan. Pesentase ASN yang

mengikuti diklat formal menurun dari 0,6 persen menjadi 0,3 persen pada tahun 2018. Sementara persentase ASN yang mengikuti diklat struktural menurun sebesar 14 persen pada tahun 2018. Dengan demikian, maka diperlukan adanya kebijakan peningkatan diklat pegawai melalui beberapa hal; Pertama, optimalisasi penerapan standar kompetensi melalui implementasi hasil pengukuran kompetensi; kedua, peningkatan sistem administrasi kepegawaian melalui melengkapi data-data kepegawaian; ketiga, optimalisasi kelembagaan perangkat daerah pengembangan sumber daya manusia melalui identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing instansi; dan keempat, optimalisasi pelaksanaan lembaga sertifikasi dan optimalisasi dukungan SDM, sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat.

#### 2.3.3.7 Penelitian dan pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini menyediakan instrumen perumusan kebijakan daerah melalui aktivitas ilmiah. Adapun indikator untuk mengukur urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 38**  
**Uraian Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

No	Uraian	Capaian
1.	Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
2.	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	87%
3.	Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %
4.	Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	100 %

*Sumber: BAPPEDA 2018*

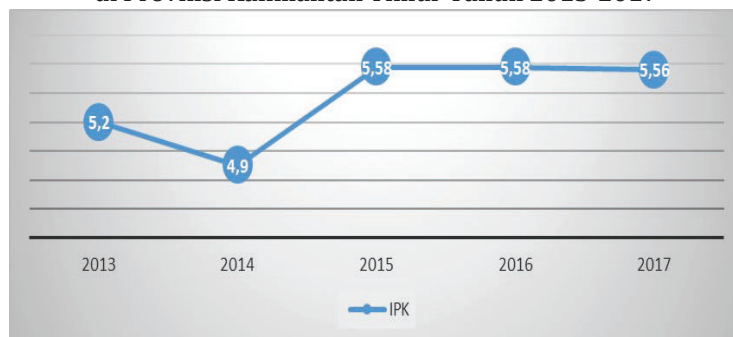
Tabel diatas menunjukkan bahwa urusan penelitian dan pengembangan sudah berjalan optimal karena perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai 100 persen. Sementara kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan baru 87 persen. Hasil ini didapatkan dari target capaian sebesar 70 persen pada tahun 2018

sementara yang terealisasi hanya 61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

#### 2.3.3.8 Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran internal instansi pemerintah. Untuk melihat kinerja pengawasan, dapat dilihat berdasarkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 2. 31**  
**Indeks Persepsi Korupsi (IPK)**  
**di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**



*Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2018; LKIP 2016*

IPK provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Turunnya nilai IPK menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah belum berjalan optimal karena cukup banyak masyarakat menganggap masih ada praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, IPK ini belum diterapkan di seluruh OPD, dimana baru diterapkan pada pelayanan perizinan berusaha. Artinya, pelayanan perizinan belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP. Berikut ini capaian TLHP BPK dan APIP di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. 39**  
**Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	49	93	80	13	13,97
2014	19	47	38	9	19,14
2015	48	112	86	26	23,21
2016	41	118	60	58	49,15
2017	31	85	26	59	69,41
2018	11	29	8	21	72,41

Sumber: inspektorat 2013-2018

**Tabel 2. 40**  
**Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	106	160	160	0	Selesai
2014	251	393	391	2	0,50
2015	203	309	308	1	0,32
2016	211	374	330	43	11,49
2017	282	421	209	212	50,35

Sumber: Inspektorat 2013-2017

Persoalan lainnya berkaitan dengan penetapan zona integritas diinternal instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini jumlah OPD yang sudah menerapkan zona integritas.

**Tabel 2. 41**  
**Jumlah SKPD yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Jumlah SKPD
1	2013	0
2	2014	1
3	2015	2
4	2016	2
5	2017	1

Sumber: Penyesuaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Saat ini, terdapat 2 (dua) OPD yang sudah ditetapkan sebaga zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penetapan ini penting karena mencerminkan komitmen

instansi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan yang optimal.

## **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

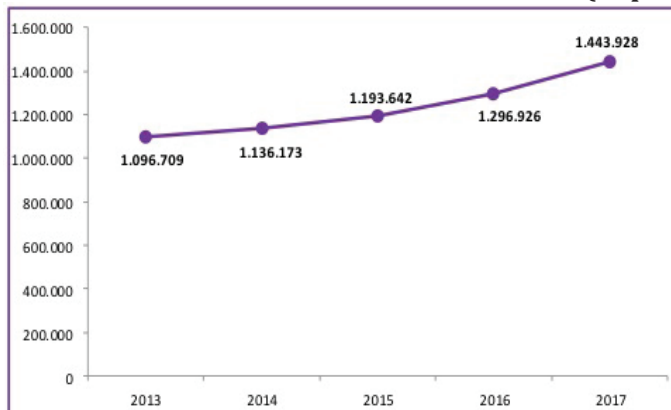
### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Gabungkan saja

#### **1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

**Grafik 2. 32**  
**Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan (Rp / %)**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Rupiah)**



*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017*

#### **2) Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)**

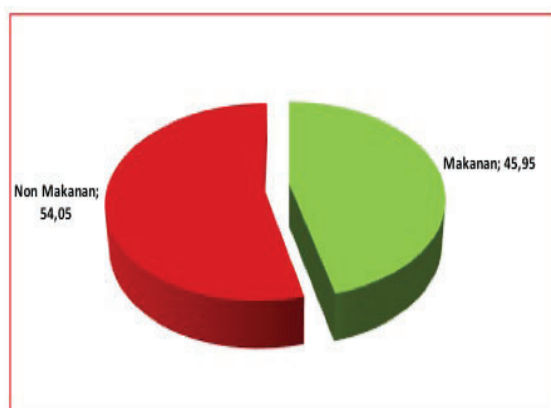
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

**Tabel 2. 42**  
**Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	588.003	627.372	644.291	709.006	780.443
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	1.443.928
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	53,62	55,22	53,98	54,67	54,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018

**Grafik 2. 33**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

### 3) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

**Tabel 2. 43**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**  
**(2012=100)**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	130,69	111,58	117,00	120,03	121,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	137,14	111,66	118,66	122,30	125,53
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,30	99,93	98,61	98,14	97,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 103,88 pada tahun 2017 turun jika dibandingkan tahun sebelumnya (104,78). Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor hortikultura yang hanya mencapai 92,45 dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya (92,03).

**Tabel 2. 44**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Menurut Subsektor Tahun 2016-2017 (2012=100)**

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2016	2017	
	<b>NTP Gabungan</b>	<b>98,14</b>	<b>97,60</b>	<b>-0,55</b>
1.	Tanaman Pangan	96,61	95,18	-1,48
2.	Hortikultura	92,03	92,45	0,46
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	99,01	96,29	-2,75
4.	Peternakan	104,78	103,88	-0,86
5.	Perikanan	99,89	101,37	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017



## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 1) Luas Wilayah Produktif

Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 45**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)**  
**terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
<b>J u m l a h</b>		<b>2.234.602</b>	<b>3.982.325</b>	<b>56,11</b>

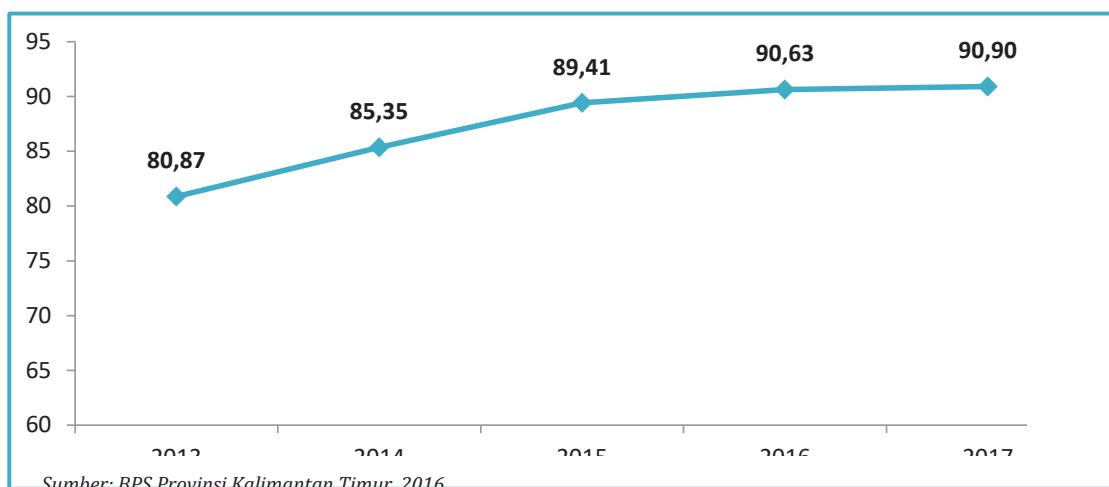
Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

### 2) Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan.

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,20 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai 90,90 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki akses ke sumber air bersih.

**Grafik 2. 34**  
**Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017**



Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

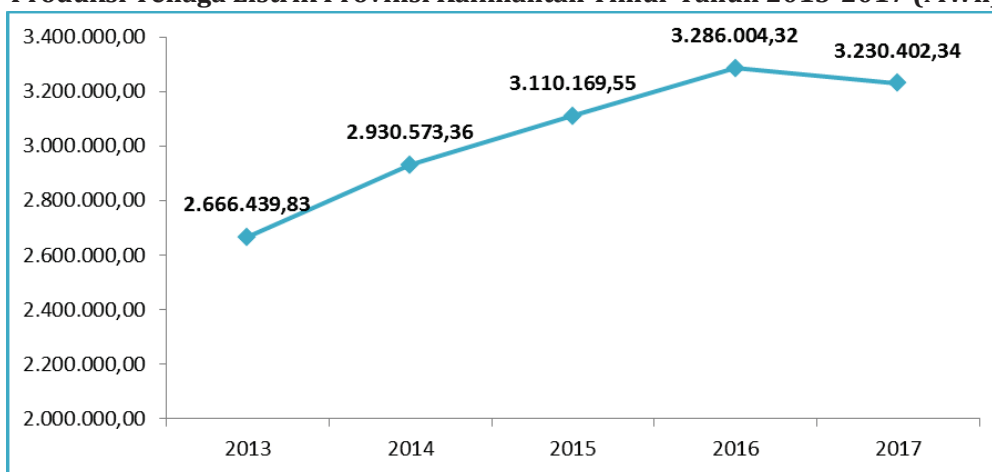
**Tabel 2. 46**  
**Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015**

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	14	14	14	14
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.549	7.083	7.264	7.938
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	5.710	5.980	6.751	7.181
4.	Efektivitas Produksi (%)	92,09	84,43	92,94	90,46

Sumber: Data Pembangunan Kaltim, 2016

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di setiap tahunnya hingga mencapai 3.326.195 MWh pada tahun 2015. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2015 berjumlah 713.891 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.682.001,81 MWh.

**Grafik 2. 35**  
**Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)**



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

**Tabel 2. 47**  
**Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	606.548	676.291	727.328	774.995	832.528
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.462.629.178	1.625.175.234	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat dilihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan. Konektivitas jalan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 147,30 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
6. Dukungan swasta belum optimal.

#### **2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Kadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang

positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

### 1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2017 terjadi 28-29 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Namun yang perlu ditindaklanjuti adalah persentase tindak kejahatan yang diselesaikan hanya mencapai 35,07 persen. “Pekerjaan Rumah” inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. 48**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

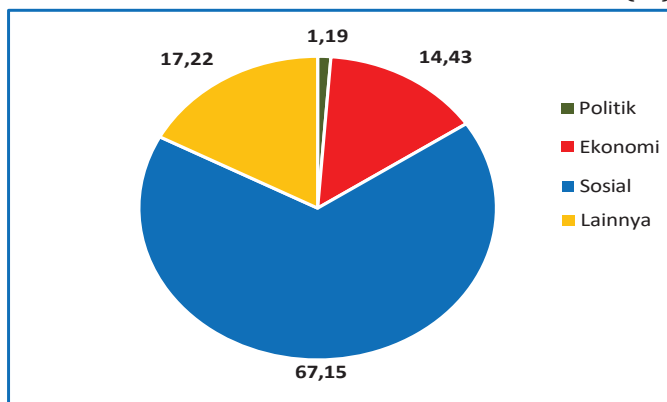
Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2012	9.950	3.545	5.405	54,37	31,10
2013	10.173	3.457	6.686	55,22	31,05
2014	9.918	3.196	6.722	57,73	29,59
2015	11.348	7.149	4.199	62,00	33,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	32,87
2017	11.705	1.591	4.105	35,07	28,81

*Sumber: Polda Kaltim 2017*

### 2) Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2016, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 755 demonstrasi dimana sebanyak 14,43 persen (109 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 67,15 persen (507 demonstrasi) terkait sosial; dan sisanya 18,41 persen (139 demonstrasi) terkait politik dan lainnya.

**Grafik 2. 36**  
**Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (%)**

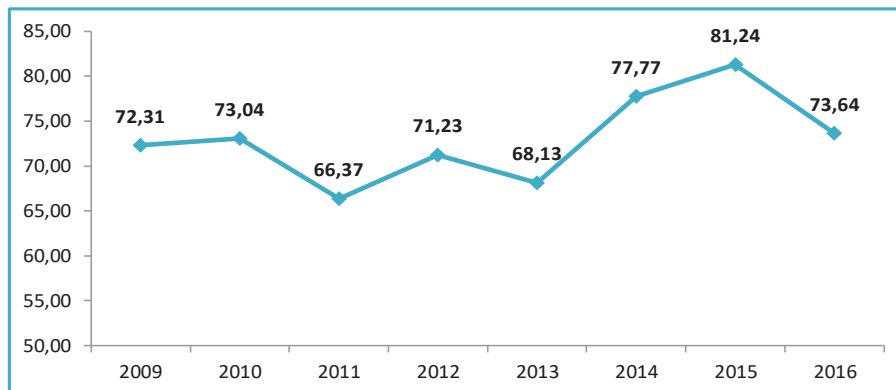


*Sumber: Polda Kaltim, 2017*

### 3) Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 81,24 pada tahun 2015. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

**Grafik 2. 37**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2016**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

#### 4) Iklim Investasi Daerah

Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 238 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 9,96 trilyun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.793 orang. Sedangkan pada penanaman modal oleh pihak asing terdapat 397 proyek sebesar 0,97 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.335 orang.

**Tabel 2. 49**  
**Indikator Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017**

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri			Penanaman Modal Asing		
	Jumlah Proyek	Modal (Juta Rp)	Tenaga Kerja Indonesia	Jumlah Proyek	Modal (US\$ 000)	Tenaga Kerja Indonesia
2010	49	7.881.289,78	6.049	56	988.710,14	17.132
2011	56	16.196.330,39	12.227	172	1.348.060,81	9.001
2012	44	7.709.270,00	50.240	167	2.529.900,00	35.579
2013	103	18.441.377,30	36.552	331	1.324.197,42	65.706
2014	60	12.983.049,70	9.505	297	2.145.665,10	27.055
2015	143	9.611.313,10	24.825	420	2.381.442,30	66.230
2016	243	6.885.124,60	29.023	471	1.181.859,20	22.204
2017	238	9.955.629,80	5.793	397	970.414,70	13.335

Sumber: DPMPTSP, 2018

#### **2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

##### **1) Rasio Lulusan S1/S2/S3**

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

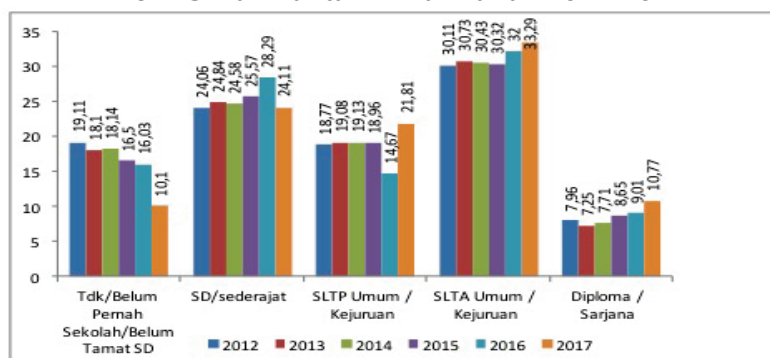
Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,01 persen saja, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen.

Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan



kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 2. 38**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut**  
**Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017**

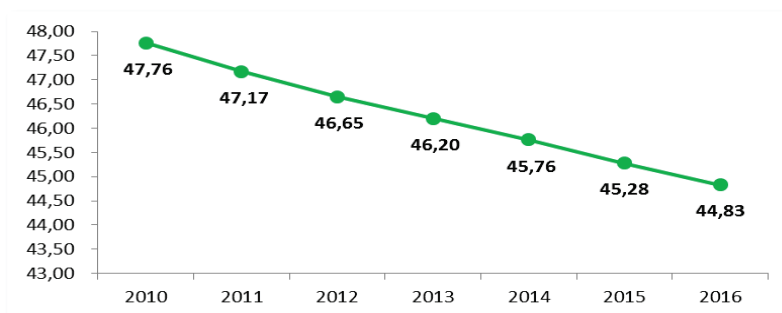


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

## 2) Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun.

**Grafik 2. 39**  
**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017